

LAPORAN PENELITIAN



PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Suharno
Sunarso
Mukhammad Mudiono

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan: (1) profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Lama; (2) profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Baru; (3) profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Reformasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap semua bahan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan tertulis baik berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, majalah, surat kabar, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde Lama adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. (b) Materi pelajaran didominasi oleh Manipol USDEK sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas. (c) Dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa, serta pendukung setia status quo. (d) Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi. (2) Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde Baru adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila serta manusia Indonesia seutuhnya. (b) Materi pelajaran meliputi: P4 (sangat dominan), UUD 1945, GBHN, dan Sejarah Kebangsaan. PKn Orde Baru dirancang untuk mendukung penguatan negara, stabilitas nasional, patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa, serta pendukung setia status quo, dalam rangka mensukseskan pembangunan. (c) Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegemoni. P4 bukan saja mendominasi PKn persekolahan, akan tetapi juga menjangkau pendidikan luar sekolah. Penataran P-4 tidak hanya dilakukan kepada seluruh siswa dan mahasiswa, akan tetapi juga dilakukan kepada PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh masyarakat. (3) Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan memberdayakan warga negara, yakni membentuk warganegara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (b) Materi pelajaran meliputi politik (cukup dominan), hukum (cukup dominan), dan moral Pancasila (sangat minim). PKn pada era ini akar keilmuannya mulai jelas, intervensi pemerintah yang sedang berkuasa minim, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral. (c) Metode pembelajarannya menggunakan dialog kritis.

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan.....	12
C. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.....	17
D. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik di Sekolah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
B. Jenis dan Pendekatan.....	25
C. Metode Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	21
A. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde Lama.....	27
B. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde Baru.....	39
C. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
Daftar Pustaka.....	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa “*revolusioner*”, anti *imperialisme*, *kolonialisme*, dan *neo kolonialisme*. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Sehubungan dengan itu, Ace Suryadi dan Somardi (2000:5) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skill*, dan (3) *civic disposition*. Inilah pengertian warga negara yang baik, yang diharapkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan di Era Reformasi.

Pendidikan Kewarganegaraan di Era Reformasi dituntut merevitalisasi diri agar mampu melaksanakan misi sesuai dengan visinya itu. Hingga saat ini mata pelajaran tersebut seakan tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi secara baik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dalam penataannya di dalam struktur kurikulum, Belinda Charles dalam Print (1999:133-135), merekomendasikan isi Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditata dalam tiga model, yaitu *formal Curriculum*, *Informal Curriculum*, *Hidden Curriculum*. Dengan model *formal curriculum*, implementasi pembelajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran (*cross-curriculum*). Dengan model *informal curriculum* dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, seperti kepanduan, klub-klub remaja, PMR, kegiatan rekreasi, dan olah raga. Model ini justru efektif dalam pembentukan karakter remaja. Dengan model *hidden curriculum*, seperti misalnya etika, dapat dikembangkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Azyumardi mengklasifikasi penyebab krisis mentalitas, moral, dan karakter mahasiswa di perguruan tinggi yang juga menjadi bagian dari pendidikan nasional. Ada tujuh masalah pokok yang turut menjadi akar krisis mentalitas dan moral di lingkungan perguruan tinggi. Antara lain:

arah pendidikan telah kehilangan obyektivitasnya; proses pendewasaan diri tidak berlangsung; proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi sangat membelenggu siswa dan mahasiswa dan, bahkan juga guru dan dosen; beban kurikulum yang demikian berat, lebih parah lagi, hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif belaka; beberapa mata pelajaran dan matakuliah, termasuk juga pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, disampaikan dalam bentuk verbalisme, yang juga disertai dengan *rote-memorizing*, pada saat yang sama siswa dan mahasiswa dihadapkan kepada nilai-nilai yang sering bertentangan; Siswa dan mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam mencari contoh teladan yang baik di lingkungannya (Azyumardi Azra, 2006:xi). Ketujuh permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya. Solusi tidak bisa dilakukan secara adhoc dan parsial. Bahkan dapat dikatakan, pemecahan masalah-masalah besar itu meniscayakan reformasi itu sendiri secara keseluruhan. Karena, masalah-masalah tersebut saling berkaitan.

Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan tinggi harus melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru. Upaya-upaya itu harus bertujuan akhir pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, bersih, bermoral, dan berakhlak; dan berpegang teguh pada nilai-nilai *civility* (keadaban). Sekolah harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk karakter. *Center for Civic Education* pada tahun 1994 dalam *National Standards for Civics and Government*. Ketiga komponen pokok tersebut, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Margaret S. Bronson, dkk., 1999:8-25).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan. Agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan *participation skills* (ketrampilan partisipasi). Karakter kewarganegaraan (*civic*

dispositions), merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) memfokuskan pada demokrasi politik atau demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Karena *Civic Education* sebagai bagian dari sosialisasi politik berfungsi sebagai pemelihara dan pengembang sistem politik yang ideal yaitu demokrasi. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan. Karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berfikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai.

Konsep tentang *Civic Education* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan *Civics* atau Ilmu Kewarganegaraan di Amerika Serikat sebagai negara asal pelajaran *Civics* dan *Civics Education*. Membahas *Civic Education* tidak dapat tanpa membahas pula tentang *Civics* yang sering dikaitkan dengan *Government*. Dalam berbagai literatur Studi Sosial dapat dijumpai istilah *Civic*, *Civics*, dan juga *Citizenship*, serta *Civic Education*. Pada bagian terdahulu dari uraian ini telah dikemukakan bahwa pada tahun 1961/1962 telah dikenal nama *Civics* di SD, sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum tahun 1968 dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi dan *Civics* atau Ilmu Kewarganegaraan.

Untuk memperoleh pemahaman secara cepat dan bersifat fundamental dapat dilakukan dengan mengkaji batasan *citizenship* seperti yang dikemukakan oleh Chapin dan Messick (1989:114) bahwa untuk memahami konsepnya perlu diketahui terlebih dahulu apa yang selayaknya dilakukan warganegara di lingkungannya, sekolah, masyarakat dan pemerintahan sebagai berikut:

“what does a citizen do? Often the answer we give depends on our frame of reference. Good citizens” in elementary schools are children who obey and cooperate. “Good citizens in our local communities are those who are perform acts of conserving public property, coming the aid of someone in distress, and so on. As teacher, our orderly classroom frame of reference can cause us to focus entirely on good citizenship as obedience. We lose sight of the larger goal of preparing children for an active, participatory citizenship. Knowing about the system of government and how it works is basic to a broader definition of the citizenship role. Good citizens protest misuse of authority by the police. Good citizens urge new laws as a way of making desirable change. This concept of citizenship requires that citizens be active, that they stand up for their

rights and those of others, and that they consider the common good when making choices and decisions. Citizenship in our society requires knowledge of how to make a system work positively for us”

Kutipan di atas menunjukkan konsep yang luas dari *Civic Education* yang pembahasannya juga mencakup aspek-aspek pengertian lainnya dari kewarganegaraan, yang pengertiannya amat bergantung pada referensi kita, apakah itu di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Namun demikian pengertian atau konsep *Civic Education* yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah tidak asing lagi sebab istilah *Civics* yang erat kaitannya dengan *Civic Education* itu sudah dikenal sejak tahun 1961/1962 melalui buku Supardo dkk. Selain itu pembahasan *Civic Education* tidak dapat dipisahkan dari *Civics* oleh karena secara structural *Civic Education* adalah perluasan dari *Civics* yang tidak hanya menekankan pada aspek teoritik warganegara dan pemerintahan tetapi sudah meluas kepada persiapan menjadi warga negara dengan pengetahuannya mengenai negara dan pemerintahan. Di samping itu diharapkan pula kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya melalui pelajaran studi sosial atau PIPS. Oleh sebab itu adalah tepat jika dikatakan bahwa tujuan akhir studi sosial adalah terbentuknya warganegara yang baik sebagaimana telah digambarkan melalui konsep *Civic Education* di atas.

Belajar dari apa yang dilakukan bangsa-bangsa lain dalam pendidikan kewarganegaraannya upaya serupa telah pula dilakukan di Indonesia. Tujuannya diantaranya adalah dalam rangka meng-Indonesia-kan Bangsa Indonesia yang memang dari berbagai aspek, baik sosial, budaya, ekonomi, agama dan bahkan ras, amat majemuk. Maka sebagai bangsa yang majemuk yang pluralistic diharapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibina warganegara yang memahami dan melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998, berikut dengan krisis moneter, ekonomi dan politik, telah mendorong reformasi bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan nasional menurut banyak kalangan bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian (*nation and character building*). Padahal pembentukan karakter dan kepribadian ini sangat penting, bahkan sangat mendesak, karena

masih berkelanjutannya berbagai krisis yang melanda bangsa dan negara Indonesia hingga saat ini (Azyumardi Azra, 2006:vi)

Di balik semua itu Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic atau Citizenship*) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang, sesuai dengan laporan penelitian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadi dan Somantri (2000:1) yang mengatakan:

“Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education”.

Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa mata pelajaran (mata kuliah) ini bersifat politis dari pada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya dan lain-lain. Akibatnya lebih lanjut, mata pelajaran ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh siswa (mahasiswa). Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajaran (mata kuliah) ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran (mata kuliah) ini muncul pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran civics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia Afrika; Hak dan Kewajiban Warga Negara; Manifesto Politik; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*, serta pidato-pidato Presiden lainnya yang dipaketkan dalam *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi)*.

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran Civics versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada Kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama “Kewargaan Negara”, yang isinya di samping Pancasila dan UUD1945, adalah Ketetapan-Ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, Hak Asasi Manusia, serta beberapa materi yang berspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan manta Ketetapan MPR No. IV/MP/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi mata pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetapberlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) telah berubah nama menjadi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tersebut telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi atau peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, pada dasarnya merupakan pendidikan politik yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Kita semua menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

Berdasar latar belakang masalah tersebut, penelitian ini hendak memotret profil Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari waktu ke waktu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apakah profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Lama?
2. Seperti apakah profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Baru?
3. Seperti apakah profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan:

1. Profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Lama.
2. Profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Orde Baru.
3. Profil kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia pada era Reformasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

E. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang amat berkaitan. John J. Cogan & Ray Derricott (Winarno, 2009: 33), membuat definisi kedua hal tersebut secara berkesinambungan bahwa *"A citizen as a constituent member of society. Citizenship as a set of characteristics of being a citizen. Citizenship education was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen"*. Warganegara adalah anggota syah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu kontribusi pendidikan untuk membangun karakteristik agar menjadi seorang warganegara. Dalam definisi yang lain dikatakan *"Citizenship is membership in a political community (originally a city or town but now usually a country) and carries with it rights to political participation; a person having such membership is a citizen"* (<http://www.wikipedia.org>). Kerwarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan sutau negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan untuk berpartisipasi politik disebut sebagai *citizen* (warganegara)

Roger M Smith (Winarno, 2009: 34) mengidentifikasi adanya 4 makna dari kewarganegaraan, sebagai berikut:

(1) *A citizen is a person with plitical rights to participate in the processes of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointive governmental offices; to serve on various sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc).* (2) *In modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, affcially sovereign political community.* (3) *In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitness club, university and broader political community).* (4) *Citizenship signifies not just membership in some groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered "true citizens" of those bodies.*

Berdasar pendapat Roger M Smith di atas, kewarganegaraan dipahami (1) sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, (2) sebagai status hukum, yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat, (3) keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada keterikatan orang tidak

hanya pada negara tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik), (4) seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warganegara.

Handbook: Making Sense of Citizenship menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki arti sebagai berikut: (1) *A legal and political status*, (2) *Involvement in public life and affairs*, (3) *An educational activity*. Kewarganegaraan mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, (3) kewarganegaraan mencakup pula aktivitas membentuk manusia menjadi warganegara yang aktif, terbuka dan bertanggungjawab.

Bryan S Turner (Winarno, 2009: 36) menyatakan *Citizenship as that set of practices (judicial, political, economic, and cultural) which as a consequence shape the flow of resources to person and social groups*. Kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang dikemukakan oleh Turner ini bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan semata-mata seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada warganya. Tetapi menurutnya kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan warga sebagai anggota dari komunitas.

Melalui penelusuran sejarah, Derek Heater (Winarno, 2009: 40), sampai pada kesimpulan bahwa kewarganegaraan adalah suatu bentuk identitas sosial politik (*citizenship is a form of socio-political identity*) dari seorang individu. Bentuk identitas sosial politik itu berbeda-beda tergantung pada sistem sosial politik apa dia berada. Heater menemukan adanya lima bentuk yaitu dalam sistem feodal (*feudal*), monarki (*monarchical*), tirani (*tyranical*), nasional (*national*), dan sistem kewarganegaraan (*citizenship system*). Dalam sistem feodal, hubungan warganegara dengan komunitas politiknya bersifat hirarkhi. Artinya status hubungan itu ditentukan berdasar keterikatan antara budak dengan sang tuan. Pandangan yang menjadi pegangan warga ini terbentuk akibat dari sifat hubungan timbal balik yaitu pelayanan dari bawah dan perlindungan dari atas dalam suatu pola piramida yang sederhana.

Dalam sistem monarki, raja merupakan penguasa tunggal memiliki kedudukan atas warganya. Warga diharapkan menunjukkan semangat kesetiaan atau loyalitas pada raja yang

dianggap sebagai lambang negara. Kesanggupan yang diharapkan dari warga paling tidak adalah kepatuhan yang bersifat pasif karena pada dasarnya hal inilah yang dibutuhkan. Sistem tirani ditunjukkan dengan bentuk pemerintahan otoriter termasuk totaliter dan kediktatoran. Dalam sistem ini, kedudukan warga jauh lebih rendah karena diakibatkan dari tujuan yang kuat akan dukungan terhadap rezim penguasa. Pandangan politiknya adalah pendapat yang dihidupkan oleh penguasa dan satu-satunya kemampuan warga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terlibat dalam pengerahan dukungan terhadap sang tiran tersebut.

Ketika warga mengidentifikasi dengan sistem *nation*, mereka mengakui statusnya sebagai anggota dari suatu kelompok budaya. Perasaan yang berhubungan dengan bentuk identitas ini adalah kecintaan pada bangsa dan kesadaran pada budaya. Dengan demikian pengetahuan tentang apa yang telah dibuat dan yang masih dijalankan agar negara menjadi besar adalah kompetensi yang dibutuhkan. Identitas warga diabadikan di dalam hak-hak yang diakui oleh negara dan kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh warganegara. Semua warganegara memiliki status yang setara. Warganegara yang baik adalah mereka yang merasakan kesetiaan pada negara dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai konsekuensinya mereka butuh keterampilan yang berkaitan dengan partisipasinya selaku warganegara.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, warganegara adalah anggota syah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai *citizen*.

F. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana telah disebut di depan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu kontribusi pendidikan untuk pembangunan karakteristik untuk menjadi seorang warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya suatu upaya pemerintah/negara untuk mendidik dan mengembangkan karakter warganegaranya agar sesuai dengan ideologi serta politik bangsanya. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan lewat pendidikan formal persekolahan bagi anak dan pemuda yang dipersiapkan menjadi warganegara yang baik, tetapi Pendidikan

Kewarganegaraan juga dapat dilakukan lewat pendidikan masyarakat di luar sistem persekolahan.

Teori besar (*grand theory*) yang membangun keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian interdisipliner termasuk di dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation and character building*. Atau sering dikenal memiliki visi meng-Indonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipun secara yuridis formal seseorang sebagai warga negara Indonesia (WNI) tetapi bisa saja karakternya bukan sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk mendidik kebangsaan warga negara dari areal politik, etnis yang berbeda-beda. Bahkan Pendidikan Kewarganegaraan masuk ke dalam pendidikan kebangsaan yang sangat progresif, sebab dalam Pendidikan Kewarganegaraan pengembangan karakter kebangsaan tidak sebatas pada *cultural nation* tetapi juga pada *political nation*. Pada konsep *cultural nation*, penanaman kebangsaan dengan cara mengembangkan memori kolektif, maupun menggambarkan tanah air yang subur, indah makmur ternyata di rasa tidak efektif lagi. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan *political nation* untuk mengembangkan ideologi negara.

Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugas mengembangkan peran warga negara memiliki dasar yang tegas dan jelas yaitu masalah pendidikan kebangsaan harus digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak-hak warga negara secara berkeadilan. Dari perlakuan pemerintah yang menjamin dan memenuhi hak-hak warga negara secara adil maka bersamaan itu akan tumbuh tanggung jawab sebagai anak bangsa yang sangat kuat. Banyak contoh yang bisa kita lihat di berbagai negara yang telah mengembangkan *political nation*, maka nasionalisme akan menguat. Dewasa ini fenomena separatisme lebih merupakan akibat dari diterlantarkannya hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegara, atau adanya ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak warganegara.

Kesadaran hak dan kewajiban kewarganegaraan yang dibangun melalui Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan proses pembelajaran yang relevan dengan kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang interdisipliner itu. Kesadaran dan partisipasi di bidang hukum dan politik serta moral kepribadian warga negara yang utuh di masyarakat multikultur perlu dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Secara universal diakui bahwa

komponen kajian pokok Pendidikan Kewarganegaraan mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang harus dicapai dalam pembelajaran.

Dalam teori sosialisasi politik Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik formal memiliki tujuan bagaimana membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian secara akademik bidang Politik merupakan akar keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian bidang Hukum dan Filsafat Moral merupakan pendukung utamanya. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan masuk bidang interdisipliner. Apabila suatu mata pelajaran tidak memiliki akar keilmuan yang jelas, maka dapat dipastikan sangat rentan terhadap selera mereka yang sedang berkuasa, akan berubah nama, substansi sejalan dengan kepentingan mereka. Sebagaimana pengalaman Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu terombang-ambing, ganti nama, ganti substansi karena kurang jelasnya akar keilmuan. Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan telah memiliki visi, misi dan akar keilmuan yang jelas, maka yang perlu dilakukan adalah mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang memberdayakan warga negara. Warganegara yang berdaya adalah merupakan fondasi utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, berdasar hukum dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Center for Civic Education (CCE) (Samsuri, 2010: 56), Calabasas, California, Amerika Serikat sebelumnya telah membuat pembagian standar kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam label *civics and government* ke dalam dua pengertian pokok, yaitu standar isi (*content standard*) dan standar kinerja (*performance standard*). Standar isi memuat pernyataan apa saja yang harus siswa ketahui dan mampu dilakukan secara spesifik dalam mata pelajaran dengan mengembangkan kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participatory skills*) di dalam pengalaman hidup mereka. Standar kinerja ialah kriteria untuk menentukan pada tahap mana siswa telah mencapai penguasaan standar isi.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian

interdisipliner termasuk di dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation and character building*.

Secara *historis-epistemologis*, Amerika Serikat dapat dicatat sebagai negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pengembangan konsep dan paradigma *Citizenship Education*. Untuk pertama kalinya pada tahun 1880-an di Amerika Serikat mulai diperkenalkan mata pelajaran *Civics* sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai Pemerintahan (Ace Suryadi, 2009: 300).

Menurut Chresore (Ace Suryadi, 2009: 300). *Civics* dipandang sebagai *the science of citizenship* atau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Selanjutnya pada tahun 1900-an, berkembang mata pelajaran *Civics* yang diisi dengan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal. Berikutnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan *New Civics* yang menitik beratkan pada *community living* atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai tahun 1970-an istilah yang lebih khusus, yakni *vocational civics*, *community civics* dan *economic civics* atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian mulai dikembangkan. Diantara tujuan dari mata pelajaran *Civics* pada tahun 1900-an itu, adalah untuk mengembangkan *social skills and civic competence* atau keterampilan sosial dan kompetensi warganegara, serta *ideas of good character* atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik.

Selain istilah *Civics*, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan istilah *Citizenship Education*, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk *character education* atau pendidikan watak, karakter dan *teaching personal ethics and virtues* atau pendidikan etika dan kebajikan (Ace Suryadi, 2009: 300) Menurut Diamond *Citizenship* mempunyai dua makna. *Pertama*, berkenaan dengan peran dan fungsi warganegara dalam kegiatan politik. Yang *kedua* berkaitan dengan kualitas pribadi yang didambakan dari warganegara, sebagaimana tercermin dalam kegiatannya sehari-hari. Menurut Gross dan Zeleny (Ace Suryadi, 2009: 301) *Civics* berkaitan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek, sedangkan *Citizenship Education*, berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warganegara dalam masyarakat. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Di situ kita melihat istilah *Civics* dan *Citizenship Education* secara bertukar pakai, untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Pada tahun 1900-an muncul istilah baru *Civic Education* yang juga digunakan secara bertukar pakai dengan istilah *Citizenship Education*. Menurut Soemantri (1972: 8) *Civic Education* merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Di lain pihak, Allen (Soemantri, 1972: 8) melihat *Citizenship Education* lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran *Civics* merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik. Sejalan dengan pendapat tersebut *The National Council for The Social Studies* (NCSS) menekankan bahwa *Citizenship Education*, sesungguhnya mencakup *all positive influence coming from formal and informal education* atau segala macam dampak yang datang baik dari pendidikan formal maupun informal. Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah-istilah *Civics*, dan *Civic Education*, ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Somantri, 1972: 9). Adapun *Citizenship Education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturant effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik (Somantri, 1972: 10).

Winataputra, merumuskan pengertian "*Civics*" dan "*Civic Education*" sebagai berikut:

"Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his-duties and rights purposefully with full responsibility".

"Citizenship Education can be defined in two ways: (1) In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge, attitudes, and skills so the students become "good" citizens, with learning experiences carefully selected and organised around the basic concepts of political science. (2) In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility" (Winataputra, 1978: 74).

Winataputra memandang *Civics* sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang dilaksanakan di sekolah, yang merupakan mata pelajaran tentang bagaimana pemerintahan

demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana warganegara seyogianya melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh rasa tanggungjawab. Adapun *Civic Education* atau *Citizenship Education* merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga siswa menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Dalam pengertian lain *Civic Education* juga dinilai sebagai *nurturant effects* atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah dan sebagai dampak pengiring dari interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggungjawab warganegara. *Civics* dilihat sebagai kajian akademis yang bersifat impersonal, sedangkan *Civic Education* dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat personal. Di dalam praktek *Civics* jelas merupakan konten utama dari *Civic Education*.

C. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upaya mendidik peserta belajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebutan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat pendidikan mulai kelas I sampai kelas XII. Pendidikan dasar berarti satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan menengah berarti satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang menghargai warganegaranya, dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan, termasuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan atau pada jaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Lewat pengajaran *Burgerkunde* tentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkan pada pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan dititipkan pada Pendidikan Moral, yakni lewat Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat, dan agama. Tidak ada pendidikan moral yang bersifat eksplisit. Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, yang isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewarganegaraan; (2) Hak dan kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga hal tersebut semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17). Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di negara Indonesia. UUDS 1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak dengan diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran Kewarganegaraan. Mata pelajaran *Civics* berisi: "(1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bagi bangsa Indonesia". (Muchson, 2001: 16).

Dalam kurikulum *Civics* di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; (4) Pancasila; (5) Pidato-pidato kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah "*Civics* Manusia Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Buku pegangan untuk murid belum ada (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI isinya meliputi: (1) Lahirnya Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang intinya ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 meliputi caturlogi, yakni: semangat nasional, konsepsi nasional, keamanan nasional, dan perbuatan nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (5) Pidato

presiden RI di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru” dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdirinya Gerakan Non Blok; (6) Manipol USDEK; (7) Amanat presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1962 istilah *Civics* diganti dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahardjo, SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik (Muchson, 2001:17).

Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnya, pengelompokan mata pelajaran dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pelengkap. Setelah tahun 1960-an, komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalam kelompok dasar, khusus, penyerta, prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguat maka penjabarannya mengikuti Instruksi Menteri menyangkut Kurikulum Pancawardana, sebagaimana yang berlaku di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, perkembangan intelektual, perkembangan emosional/ artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal ini berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968 berada dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaran terdiri dari Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 dengan nama “Pendidikan Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studi untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila dilengkapi atau bahkan didominasi oleh materi dan bahan-

bahan P4. Dampak selanjutnya P4 cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan warganegara, sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untuk digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 699).

Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atas dasar Keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajaran yang bersangkutan paut diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi menjadi bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, dan saat ini diberi nama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagai penyesuaian Kurikulum 1975 (Abdul Azis Wahab, 2007: 701).

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: Hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 1994 adalah merupakan:

Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di atas adalah perilaku seperti yang tercantum di dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warganegara, antara warga negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, serta Surat Edaran Menteri Pertahanan dan Keamanan SE/001/M/III/88.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi atau peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, pada dasarnya merupakan pendidikan politik yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi. Kita semua menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda.

D. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik di Sekolah

Menurut Almond dan Verba (1984: 447), Pendidikan politik adalah upaya agar warganegara mampu berpartisipasi secara aktif dalam politik. Senada dengan Almond Ramlan Surbakti menyatakan (1992:17), pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik. Lebih lanjut, Alfian berpendapat bahwa (1990:245), pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Dalam bukunya *School and Society*, Dewey (MIF Baihaqi, 2007: 48) berpendapat bahwa, negara adalah sebagai bentuk masyarakat tertinggi, untuk itu pendidikan harus diarahkan kepada pembentukan warganegara yang baik. Dalam mengembangkan pendidikan, harus diketahui apa yang ada pada si anak untuk dikembangkan. Juga harus diketahui kemana potensi anak itu harus

disalurkan. Semua harus diabdikan kepada kehidupan sosial, dengan demikian pendidikan adalah proses sosial

Menurut Dewey (Zamroni, 2007: 155), ada hubungan yang erat antara demokrasi dan pendidikan. Apabila kita menginginkan suatu masyarakat yang demokratis, yang pertama-tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan. Hal ini berarti pendidikan bukanlah sesuatu yang mencekoki peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan itu dimiliki karena pengalaman peserta didik. John Dewey, bapak pendidikan modern menyatakan: *"Democracy has to be born anew in each generation and education is its midwife"*. Secara lebih umum, Plato dan Aristoteles menyatakan: "Bagaimana keadaan negara, begitulah keadaan sekolah", " Apa yang kamu inginkan untuk negara, kamu harus juga menyediakan untuk sekolah". Lebih lanjut Dewey (Zamroni, 2007: 159), menyatakan bahwa, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Lebih lanjut menurut Dewey, demokrasi bukan hanya menyangkut suatu bentuk pemerintahan, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Zamroni (2007: 160), tidak mengherankan jika seluruh sistem pendidikan di dunia senantiasa memiliki tugas untuk menanamkan pada generasi muda nilai-nilai politik serta kebijakan politik penguasa. Setiap rezim yang sedang berkuasa secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kepentingan terhadap PKn. PKn ibarat pedang bermata dua, di satu sisi dapat dijadikan sarana untuk memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatu sistem politik melalui proses pendidikan di sekolah. Akan tetapi di sisi yang lain PKn juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaan rezim dalam bentuk indoktrinasi serta hegemoni melalui pendidikan. Sisi yang pertama tadi harus diupayakan, sedang sisi yang kedua sebaiknya dihindari. Oleh karena itu PKn di Indonesia harus dikembangkan dengan mengacu pada politik negara yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, tidak boleh mengacu pada kepentingan jangka pendek dari penguasa. Indoktrinasi dalam PKn memang merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, khususnya yang menyangkut tataran idealisme. Sedangkan yang terkait instrumentasi dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara metode indoktrinasi harus dihindarkan, metode dialogis harus dikedepankan.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, bahwa pendidikan politik adalah penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, serta direncanakan, dilakukan terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga warganegara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab.

Sarana pendidikan politik menurut Almond (Mochtar Mas'oeed, 1997: 37), meliputi: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung. Di sekolah anak akan menerima sosialisasi politik secara sistematis dan terencana. Di sekolah anak mendapat pengetahuan tentang dunia politik dan peran mereka di dalamnya. Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memegang peranan penting. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sosialisasi politik lewat sekolah dipengaruhi agen-agen yang lain, namun sosialisasi politik lewat sekolah sering dinyatakan lebih bermakna dibandingkan melalui agen-agen yang lain. Karena sekolah memiliki karakteristik antara lain, terprogram, dan sistematis lewat kurikulum.

Menurut para ahli ada beberapa teori yang terkait dengan pendidikan politik, (Cholisin, 2000: 6.3-6.5), beberapa teori tersebut antara lain: teori sistem, teori hegemonik, teori psikodinamik, teori belajar sosial, dan teori perkembangan kognitif. *Pertama*, teori sistem. Menurut teori ini sosialisasi politik dianggap memainkan peran utama dalam menjaga kestabilan politik. Oleh karena itu, sosialisasi politik harus diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik ideal yang ingin dibangun oleh suatu negara.

Kedua, teori hegemonik. Menurut teori ini sosialisasi politik pada suatu negara dikendalikan oleh kelompok dominan (elit), dan ditujukan untuk kelompok yang didominasi (rakyat). Kelompok dominan akan menghegemoni kelompok yang lemah agar tunduk dan patuh pada penguasa. Pendidikan politik diarahkan untuk kekuatan politik tertentu (penguasa), bukan untuk mendukung politik nasional yang berdasar konstitusi.

Ketiga, teori psikodinamik. Menurut teori ini, pengalaman pada masa kanak-kanak akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap pembentukan kepribadian seseorang setelah mereka dewasa. Pengalaman pribadi yang terbentuk pada masa kanak-kanak akan menentukan orientasi politik seseorang setelah dewasa. Faktor internal sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan orientasi politik seseorang.

Keempat, teori belajar sosial. Menurut teori ini pesan-pesan yang diterima seseorang dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, akan sangat menentukan

orientasi dan pandangan politik seseorang. Faktor eksternal sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan orientasi politik seseorang.

Kelima, teori perkembangan kognitif. Menurut teori ini pemahaman serta respon seseorang terhadap sesuatu termasuk pandangan politiknya, akan sangat ditentukan oleh kapasitas serta kemampuan pemikirannya.

PKn sebagai pendidikan politik menurut Almond (Mochtar Mas'oeed, 1997: 38), memiliki peran sebagai *system maintenance*, yakni kemampuan dari sistem politik untuk memelihara dan mempertahankan dirinya secara terus menerus. Dalam pandangan Easton dan Dennis PKn sebagai pendidikan politik berperan sebagai *system persistence*, yaitu kemampuan sistem politik untuk bertahan secara terus menerus meskipun sambil mengalami perubahan-perubahan. Dengan demikian PKn sebagai pendidikan politik arah pengembangannya lebih tepat menganut teori sistem, sedangkan pola pembelajarannya lebih tepat menggunakan teori belajar sosial. PKn sebagai pendidikan politik harus mampu mengindonesiakan orang Indonesia.

PKn Orde Lama dan Orde Baru lebih menggunakan pendekatan teori hegemonik, hal itu tentu saja sesuai dengan situasi politik pada saat itu. PKn era Reformasi sebaiknya dikembangkan dengan mengacu pada teori belajar sosial dan teori sistem. Sedangkan teori psikodinamik dan teori perkembangan kognitif dapat digunakan untuk melengkapinya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan, pengumpulan data dilakukan dari bulan April sampai Oktober 2018.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada: (1) peneliti sendiri sebagai instrumen kunci; (2) lebih mementingkan segi proses daripada hasil; (4) menggunakan analisis data secara induktif; (5) lebih mementingkan sifat-sifat dasar dari data yang berhubungan dengan makna (Bogdan, 1982: 5).

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap semua bahan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan tertulis baik berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, majalah, surat kabar, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan verifikasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data ditempuh melalui konfirmasi antar dokumen.

E. Teknik Analisis Data.

Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari dokumentasi merupakan data mentah yang masih bersifat acak dan kompleks. Untuk itu peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna serta mampu menjawab permasalahan penelitian, selanjutnya data disederhanakan.

Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah dipilih dan disederhanakan tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang

jelas dari hasil penelitian.

Display Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu: (1) Filosofi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (2) Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (3) Campur tangan rezim yang sedang berkuasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Substansi materi Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi; dan (5) Kandungan nilai-nilai demokrasi dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasikan dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde Lama

Apabila kita berbicara mengenai kurikulum maka kita tidak terlepas dari politik. Mengingat kurikulum tidak lain dari sarana yang mengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan suatu bangsa tampak dengan jelas ketika Republik Indonesia baru berumur sekitar 4 bulan yaitu pada tanggal 29 Desember 1945 BP-KNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk secepat mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Dalam surat BP-KNIP tersebut diberikan beberapa pedoman di dalam penyusunan kurikulum antara lain:

(1) Agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pelajaran yang sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. (2) Agar disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakannya sehingga sesuai dengan keadilan sosial. (3) Metodik yang digunakan adalah metodik sekolah kerja. (4) Pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurangi hak bagi warga negara yang mempunyai keyakinan lain. (5) Wajib belajar 6 tahun agar dilaksanakan secara berangsur dalam waktu 10 tahun. (6) Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 12).

Sejalan dengan itu BP-KNIP menyarankan suatu susunan persekolahan sebagai berikut:

Tingkat sekolah dasar dibedakan antara 3 tahun sekolah pertama dan 3 tahun sekolah rakyat selanjutnya dan pada tiap sekolah rakyat dibentuk kelas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada tamatan sekolah rakyat memasuki hidup bermasyarakat. Di atas sekolah rakyat adalah sekolah menengah yang terdiri atas Bagian A (Alam) dan Bagian B (Budaya). Selanjutnya terdapat sekolah menengah tinggi 3 tahun juga terbagi atas Bagian A (Alam) dan Bagian B (Budaya). Akhirnya terdapat sekolah tinggi. Berdasarkan permintaan BP-KNIP tersebut dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran. Panitia tersebut dapat melaksanakan tugasnya antara lain menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947. Perbedaan antara usul BP-KNIP dengan hasil karya Panitia Penyelidik Pengajaran ialah adanya sekolah rakyat 6 tahun. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Pada era demokrasi terpimpin telah terbit buku yang berjudul “*Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru*”, karangan Mr. Soepardo, dan kawan-kawan. Materi buku itu berisi tentang: (1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; (2) Pancasila; (3) UUD 1945; (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; (5) Konferensi Asia-Afrika; (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara; (7) Manifesto Politik; (8) Laksana Malaikat; (9) Lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959; (10) Pidato Lahirnya Pancasila; (11) Panca Wardana; (10) *Declaration of Human Rights*; serta

(11) Pidato-pidato lainnya dari Presiden Soekarno dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (Tubapi) serta kebijakan Panca Wardhana dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prijono (Jakarta: Balai Pustaka, 1962, cet. 2). Buku tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah pada saat itu (Samsuri, 2010: 116).

Buku *Civics*, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia tersebut memuat penjelasan idealitas masyarakat yang dibentuk, yakni masyarakat sosialis Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Udin S. Winataputra:

“Buku ini lahir sesuai konteks kebutuhan politik pada jamannya yang mengusung secara besar-besaran gagasan-gagasan Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia” (wawancara, 6 Agustus 2011)

Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Lama mengalami dinamika sebagai berikut: Kewarganegaraan (1957), dan *Civics* (1961). Mata pelajaran Kewarganegaraan (1957) materinya masih sangat sederhana yakni membahas cara memperoleh kewarganegaraan bagi seseorang dan hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Mata pelajaran *Civics* yang mulai diperkenalkan tahun 1961 lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama untuk “*nation and character building*” bagi bangsa Indonesia, mirip pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika (Samsuri, 2010: 116).

a. Kurikulum Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Salah satu upaya penting untuk mengembangkan pendidikan nasional dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada saat itu (Mr. Soewandi) yaitu mengubah sistem pendidikan dan pengajaran sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan nasional (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Sebagai konsekuensi perubahan sistem, kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula. Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkut kurikulum adalah bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Mengurangi pendidikan pikiran. (2) Menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. (3) Memberikan perhatian terhadap kesenian. (4) Meningkatkan pendidikan watak. (5) Meningkatkan pendidikan jasmani. (6) Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, pada tahun 1946 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di Republik Indonesia. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat (SR) 1947, susunannya amat sederhana, yaitu hanya memuat dua unsur pokok. Adapun kedua unsur pokok tersebut adalah:

(1) Daftar jam pelajaran atau struktur program, dan (2) Garis-garis besar program pengajaran. Dalam Rencana Pelajaran ini tidak ditemukan dasar, tujuan, dan asas pendidikan sehingga para pemakai buku Rencana Pelajaran itu hanya menemukan bahan-bahan pengajaran yang harus diajarkan dan petunjuk singkat tentang cara mengajarkan kepada murid. Rencana Pelajaran 1947 membedakan tiga macam struktur program, yaitu: *pertama*, untuk sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa Daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendah; *kedua*, untuk sekolah yang berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai kelas 1; *ketiga*, untuk sekolah yang diselenggarakan sore hari karena terpaksa oleh keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselenggarakan pagi hari. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 16).

(1) Kurikulum SR (dengan Pengantar Bahasa Daerah) 1947

Dalam Rencana Pelajaran 1947, sebagaimana tabel di bawah ini belum dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Yang ada adalah mata pelajaran Budi Pekerti. Mata pelajaran ini berisi pendidikan nilai dan moral. Suatu hal yang juga merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Tabel 1
Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah Sampai Kelas III

N0	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	KelasIV	KelasV	KelasVI
1	Bahasa Indonesia	-	-	8	8	8	8
2	Bahasa Daerah	10	10	5	4	4	4
3	Berhitung	6	6	7	7	7	7
4	Ilmu Alam	-	-	-	-	1	1
5	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	2
6	Ilmu Bumi	-	-	1	1	2	2
7	Sejarah	-	-	-	1	2	2
8	Menggambar	-	-	-	-	2	2
9	Menulis	4	4	4	3	-	-
10	Seni Suara	2	2	2	2	2	2
11	Pekerjaan Tangan	1	1	2	2	2	2
12	Pekerjaan Keputrian	-	-	-	1	2	2

13	Gerak Badan	3	3	3	3	3	3
14	Kebersihan dan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
15	Didikan Budi Pekerti	1	1	2	2	2	3
	Sub Jumlah	28	28	35	37	40	41
16	Pendidikan Agama	-	-	-	2	2	2
	Jumlah	28	28	35	39	42	43

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

(2) Kurikulum SR (dengan Pengantar Bahasa Indonesia) 1947

Sebagaimana Sekolah Rakyat dengan pengantar bahasa daerah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum dikenal dalam kurikulum ini, yang ada adalah mata pelajaran Budi Pekerti, masing-masing 1 jam pelajaran perminggu untuk kelas I dan II, 2 jam untuk kelas III, IV, dan V, serta 3 jam untuk kelas VI.

Tabel 2
Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

N0	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III	KelasIV	KelasV	KelasVI
1	Bahasa Indonesia	10	10	8	8	8	8
2	Bahasa Daerah	-	-	6	7	7	7
3	Berhitung	6	6	7	7	7	7
4	Ilmu Alam	-	-	-	-	1	1
5	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	2
6	Ilmu Bumi	-	-	1	1	2	2
7	Sejarah	-	-	-	1	2	2
8	Menggambar	-	-	-	-	2	2
9	Menulis	4	4	4	4	-	-
10	Seni Suara	2	2	2	2	2	2
11	Pekerjaan Tangan	1	1	2	2	2	2
12	Pekerjaan Keputrian	-	-	-	1	2	2
13	Gerak Badan	3	3	3	3	3	3
14	Kebersihan dan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
15	Didikan Budi Pekerti	1	1	2	2	2	3
	Sub Jumlah	28	28	36	41	43	44
16	Pendidikan Agama	-	-	-	2	2	2
	Jumlah	28	28	36	43	45	46

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

(3) Kurikulum SMP (Awal Kemerdekaan)

Pendidikan Kewarganegaraan belum diberikan dalam kurikulum ini. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berlaku sesudah kemerdekaan disebut “Daftar Pelajaran SMP” yang digunakan pada kurun waktu 1945-1962. Adapun Struktur Program SMP sebelum tahun

1962 meliputi sembilan kelompok mata pelajaran yaitu kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pelajaran ekonomi, pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, dan agama terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum SMP
Sebelum Tahun 1962

Kel	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas IIIA	Kelas IIIB
I	Kelompok Bahasa				
	1. Bahasa Indonesia	5	5	6	5
	2. Bahasa Inggris	4	4	4	4
	3. Bahasa Daerah	2	2	2	1
	Sub Jumlah	11	11	12	10
II	Kelompok Ilmu Pasti				
	1. Berhitung dan Aljabar	4	3	2	4
	2. Ilmu Ukur	4	3	-	4
	Sub Jumlah	8	6	2	8
III	Kelompok Pengetahuan Alam				
	1. Ilmu Alam/Kimia	2	3	2	2
	2. Ilmu Hayat	2	2	2	2
IV	Kelompok Pengetahuan sosial				
	1. Ilmu Bumi	2	2	3	3
	2. Sejarah	2	2	2	2
	Sub Jumlah	4	4	5	5
V	Kelompok Pelajaran Ekonomi				
	1. Hitung Dagang	-	1	2	-
	2. Pengetahuan Dagang	-	-	2	-
	Sub Jumlah	-	1	4	-
VI	Kelompok Pelajaran Ekspresi				
	1. Seni Suara	1	1	1	1
	2. Menggambar	2	2	2	2
	3. Pek. Tangan/Ker. Wanita	2	2	2	2
	Sub Jumlah	5	5	5	5
VII	Pendidikan Jasmani	3	3	3	3
VIII	Budi Pekerti	2	2	2	2
IX	Agama	2	2	2	2
	Jumlah	37	37	37	37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen. Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

(4) Kurikulum SMA (Awal Kemerdekaan)

Mata pelajaran Tata Negara mulai diberikan dalam kurikulum ini, akan tetapi Didikan Budi Pekerti justru tidak ada. Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak jauh berbeda dengan kurikulum AMS. Perbedaannya hanya pada mata pelajaran Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Kurikulum AMS bagian B memberikan pelajaran Bahasa Belanda dan tidak memberikan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kurikulum SMA jurusan B memberikan pelajaran Bahasa Indonesia dan tidak memberikan Bahasa Belanda.

Sebagai perbandingan, kurikulum AMS bagian B dan SMA jurusan B disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4
Perbandingan Susunan Mata Pelajaran antara
AMS Afdeling B (1939/1940) dengan SMA Jurusan B (1950/1951)

No	Mata Pelajaran	AMS Kelas I	AMS Kelas II	AMS Kelas III	SMA Kelas I	SMA Kelas II	SMA Kelas III
1	Ilmu Pasti	6	5	4	7	5	5
2	Ilmu Pesawat	-	-	2	-	-	2
3	Ilmu Alam	3	4	4	4	4	5
4	Ilmu Kimia	3	3	5	3	3	5
5	Ilmu Hayat	2	1	2	2	2	1
6	Ilmu Falak	-	-	1	-	1	1
7	Bahasa Belanda	4	4	4	-	-	-
8	Bahasa Indonesia	-	-	-	3	3	3
9	Bahasa Inggris	2	2	2	3	3	3
10	Tata Negara	1	1	-	-	1	1
11	Ekonomi	-	1	1	1	1	1
12	Tata Buku	-	1	2	-	2	1
13	Sejarah	3	2	2	2	2	1
14	Ilmu Bumi	2	2	1	1	1	1
15	Bahasa Jerman	3	3	3	4	2	2
16	Bahasa Perancis	4	4	2	2	2	2
17	Menggambar Tangan	2	1	2	1	1	-
18	Menggambar Mistar	-	2	1	-	2	2
19	Pendidikan Jasmani	2	2	1	3	3	3
	Jumlah	33	34	32	34	36	37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

b. Kurikulum SR 1964

Mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kemasyarakatan sebagai embrio Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Agama digabung dengan Budi Pekerti. Kurikulum 1964 lebih populer dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 membedakan antara Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat untuk sekolah berbahasa pengantar bahasa daerah di kelas I sampai III dan Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat untuk sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia mulai kelas I. Berikut ini adalah Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964.

Tabel 5
Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964
Susunan Mata Pelajaran untuk Sekolah Berbahasa Pengantar
Bahasa Daerah di Kelas I sampai Kelas III

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Perkembangan Moral						
	1. Pendidikan Kemasyarakatan	1	2	3	3	3	3
	2. Agama/Budi Pekerti	1	2	2	2	2	2
	Sub Jumlah	2	4	5	5	5	5
II	Perkembangan Kecerdasan						
	3. Bahasa Daerah	9	8	5	3	3	3
	4. Bahasa Indonesia	-	-	6	8	8	8
	5. Berhitung	6	6	6	6	6	6
	6. Pengetahuan Alamiah	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	16	15	19	19	19	19
III	Perkembangan Emosional						
	7. Pendidikan Kesenian	2	2	4	4	4	4
IV	Perkembangan Keprigelan						
	8. Pendidikan Keprigelan	2	2	4	4	4	4
V	Perkembangan Jasmani						
	9. Pendidikan Jasmani	3	3	4	4	4	4
	Jumlah	25	26	36	36	36	36

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

c. Kurikulum SMP 1962

Menurut Udin S. Winataputra:

Pendidikan Kewargaan Negara (*Civics*) untuk pertama kalinya diberikan di SMP. Kurikulum SMP 1962 disebut juga “Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru”. Dalam Konferensi Pengawas SMP seluruh Indonesia, bulan Juli 1962 di Tugu Bogor, Rencana Pelajaran SMP diubah dan disesuaikan dengan Sistem Pendidikan Pancawardhana. (wawancara, 6 Agustus 2011).

Perubahan penting yang dilakukan pada waktu itu ialah sebagai berikut. *Pertama*, penghapusan bagian A dan B pada kelas III SMP yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa rendah diri pada siswa bagian A, dan sebaliknya menghilangkan rasa lebih tinggi pada siswa bagian B. Dengan demikian, semua siswa SMP menerima pelajaran yang sama dari kelas I sampai kelas III. *Kedua*, penambahan dua mata pelajaran baru ke dalam Rencana Pelajaran SMP, yaitu Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan penambahan dua mata pelajaran tersebut diharapkan para siswa yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang

lebih tinggi, mendapat bekal untuk terjun ke masyarakat. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ialah pendidikan ke arah keselamatan, ketenteraman, serta kemakmuran lahir dan batin dalam kehidupan keluarga. *Ketiga*, dimasukkannya jam krida dengan maksud memberikan kesempatan yang luas bagi para siswa untuk menemukan atau memupuk bakat dan minat mereka masing-masing di bawah bimbingan yang teratur dari guru, dan selanjutnya untuk mengembangkan karya yang berguna bagi siswa kelak dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, jam krida juga dimaksudkan untuk menanamkan penghargaan terhadap pekerja kasar karena pada jam krida diajarkan juga keterampilan yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti perbengkelan sepeda, pertukangan, atau mencukur. *Keempat*, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yang dimaksudkan untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang diri para siswa (kecuali melalui krida). Melalui bimbingan dan penyuluhan (*guidance and conseling*) minat, dan bakat siswa dapat dipupuk dan dikembangkan untuk keperluan pembangunan nasional.

Pengelompokan mata pelajaran dalam Rencana Pelajaran yang disusun dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut: (1) “Kelompok Dasar” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurna serta sehat dan kuat jasmaniah dan rohaniyah. (2) “Kelompok Cipta” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehingga dapat mewujudkan tenaga kejuruan yang ahli. (3) “Kelompok Rasa/Karsa” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhi tuntutan sosial masyarakat Indonesia, supaya anak didik cinta kepada keindahan. (4) “Krida” adalah kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk minat, bakat, dan kemampuan.

Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru berlaku mulai 1 Agustus 1962, yaitu permulaan tahun ajaran 1962/1963. Daftar Pelajaran SMP Gaya Baru serta Struktur Program pada Kurikulum 1962 SMP disajikan pada Tabel 10. Pada bulan Desember 1967, Dinas SMP bersama Urusan SMP seluruh Indonesia dan beberapa tenaga ahli dari Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Sejarah dan Antropologi, serta Proyek Bahasa Inggris menyelenggarakan Musyawarah Kerja untuk mengadakan penyempurnaan Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru yang disesuaikan dengan tuntutan Orde Baru. Penyempurnaan kurikulum antara lain mengenai penggantian nama “Rencana Pelajaran” menjadi “Rencana Pendidikan”. Hal ini dilakukan agar lebih sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Selain itu, nama-nama kelompok mata pelajaran diganti dan

diseragamkan dengan “Rencana Pendidikan” untuk jenis sekolah menengah lain yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Tabel 6
Susunan Mata Pelajaran SMP Gaya Baru
Tahun 1962

Kelp.	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
A	Kelompok Dasar			
	1. Civics (Kewargaan Negara)	2	2	2
	2. Bahasa Indonesia	5	5	5
	3. Sejarah Kebangsaan	1	1	1
	4. Ilmu Bumi Indonesia	1	1	1
	5. Pend. Agama/Budi Pekerti	2	2	2
	6. Pend. Jasmani/ Kesehatan	2	2	2
	Sub Jumlah	13	13	13
B	Kelompok Cipta			
	1. Bahasa Daerah	2	2	2
	2. Bahasa Inggris	4	4	4
	3. Ilmu Aljabar	3	3	3
	4. Ilmu Ukur	3	3	3
	5. Ilmu Alam	2	2	2
	6. Ilmu Hayat	2	2	2
	7. Ilmu Bumi Dunia	1	1	1
	8. Sejarah Dunia	1	1	1
	9. Ilmu Administrasi	1	1	1
	Sub Jumlah	19	19	19
C	Kelompok Rasa/Karsa			
	1. Menggambar	2	2	2
	2. Kesenian	1	1	1
	3. Prakarya	2	2	2
	4. Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
	Sub Jumlah	6	6	6
D	Krida	2	2	2
	Jumlah	40	40	40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

d. Kurikulum SMA 1952

Untuk pertama kalinya mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan diberikan di SMA. Status mata pelajaran tersebut masuk dalam kategori penting (untuk SMA Bagian A), pelengkap (untuk SMA Bagian B), dan pokok (untuk SMA Bagian C).

Kurikulum SMA 1952 dikembangkan dalam Konferensi Direktur SMA mengenai Rencana Pelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai 6 Februari 1952 di Bogor. Dalam konferensi tersebut di antaranya dinyatakan bahwa kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 1950/1951, bersifat terlalu akademik dan kurang memperhatikan keterampilan dan

moral siswa sehingga kurikulum tersebut tidak sesuai dengan tujuan SMA yang mempersiapkan murid masuk ke perguruan tinggi dan ke masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, perlu diadakan perbaikan terhadap kurikulum yang ada. Perbaikan kurikulum tersebut mengacu pada tujuan SMA yang telah ditetapkan berdasarkan hasil keputusan konferensi tersebut. Kurikulum SMA 1952 mulai diberlakukan pada tahun 1952 dengan rincian mata pelajaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian A
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Bhs & Kesusasteraan Indonesia	4	4	5
	2. Bahasa Daerah	2	2	-
	3. Jawa Kuno	2	2	-
	4. Bahasa Inggris	4	4	6
	5. Bahasa Perancis	(3)	(3)	(3)
	6. Bahasa Jerman	(3)	(3)	(3)
	7. Sejarah	3	3	3
	8. Ilmu Bumi	2	2	2
	Sub Jumlah	20	20	19
Penting	9. Sejarah Kesenian	1	1	1
	10. Sejarah Kebudayaan	2	2	2
	11. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
	12. Ekonomi	2	2	2
	13. Tata Neg & Kewarganeg.	2	2	3
	Sub Jumlah	8	8	9
	Sub Jumlah	8	8	9
Pelengkap	14. Aljabar	1	1	-
	15 Ilmu Kesehatan	1	1	-
	16. Menggambar	2	2	2
	17. Pendidikan Jasmani	3	3	2
	18. Pendidikan Agama	2	2	2
	Sub Jumlah	9	9	6
	Jumlah	37	37	34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

SMA bagian A (Budaya) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “penting”.

Tabel 8
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian B
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Aljabar	2	2	3
	2. Ilmu Ukur sudut	2	2	2
	3. Ilmu Ukur Ruang	2	2	2
	4. Ilmu Ukur Melukis	1	1	1
	5. Ilmu Alam	4	5	5
	6. Mekanika	1	1	1
	7. Ilmu Kimia	4	5	5
	8. Ilmu Hayat dan Kesehatan	2	2	2
	Sub Jumlah	18	20	21
Penting	9. Bahasa Indonesia	2	2	2
	10. Bahasa Inggris	3	3	4
	Sub Jumlah	18	20	21
Pelengkap	11. Bahasa Jerman	(2)	(2)	(1)
	12. Bahasa Perancis	(2)	(2)	(1)
	13 Bumi Alam dan Falak	2	1	-
	14. Sejarah	2	1	-
	15. Tata Neg & Kewarganeg.	1	1	-
	16. Ekonomi	1	1	-
	17. Tata Buku	(2)	(2)	(2)
	18. Menggambar	(2)	(2)	(2)
	19. Pendidikan Jasmani	2	2	2
	20. Pendidikan Agama	2	2	2
Sub Jumlah	14	12	7	
Jumlah	37	37	34	

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

SMA bagian B (Ilmu Alam) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pelengkap”.

Tabel 9
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian C
Tahun 1952

Golongan	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
Pokok	1. Tata Neg & Kewarganeg.	2	2	2
	2. Tata Hukum	1	1	1
	3. Ekonomi	3	3	3
	4. Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi	3	3	3
	5. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
	6. Sejarah	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	12

Penting	7. Pengetahuan dan Hitung	2	2	2
	8. Tata Buku	2	2	2
	9. Sejarah Perekonomian	-	2	2
	10. Bahasa Indonesia	3	3	3
	11. Bahasa Inggris	4	4	4
	Sub Jumlah	11	13	13
	12. Bahasa Jerman	(2)	(2)	(2)
	13. Bahasa Perancis	(2)	(2)	(2)
Pelengkap	14. Ilmu Kimia dan Peng. Bahan	2	1	1
	15. Aljabar	2	2	-
	16. Ilmu Kesehatan	1	1	-
	17. Menggambar	2	2	2
	18. Pendidikan Jasmani	2	2	2
	19. Pendidikan Agama	2	2	2
	Sub Jumlah	13	13	9
	Jumlah	36	38	34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Sedangkan untuk SMA bagian C (Ilmu Sosial) mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pokok”.

e. Kurikulum SMA 1961

Mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaraan diganti menjadi “Kewarganegaraan”. Kewarganegaraan berdiri sendiri sebagai mata pelajaran dan termasuk dalam kategori mata pelajaran “Kelompok Dasar”.

Kurikulum SMA 1961, dikembangkan pada tanggal 6 sampai 13 November 1961 melalui pertemuan antara SMA Teladan di Surakarta yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap usaha pembaharuan kurikulum yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut antara lain dihasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, rumusan yang tepat mengenai tujuan SMA ialah mengembangkan cita-cita hidup serta mengembangkan kemampuan dan kesanggupan sebagai anggota masyarakat dan mendidik tenaga ahli dalam berbagai lapangan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing serta keperluan masyarakat sehingga tamatannya mempunyai dasar-dasar ilmu dan kecakapan seperlunya untuk mengembangkan diri terutama pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan lembaga masyarakat.

Kedua, penggolongan mata pelajaran di SMA dibagi menjadi empat kelompok yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: (1) Kelompok dasar (enam mata pelajaran) yaitu mata pelajaran yang diperlukan bagi seluruh siswa dalam rangka pembentukan warga negara: kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi, dan pendidikan jasmani dan

kesehatan; (2) Kelompok khusus (tujuh mata pelajaran yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan bakat siswa dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; (3) Kelompok penyerta (tiga mata pelajaran) yang dianggap perlu untuk memperluas mata pelajaran kelompok khusus; dan (4) Kelompok prakarya dan krida; krida adalah kegiatan bidang kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan yang harus diselenggarakan di setiap sekolah berdasarkan instruksi Menteri P dan K tahun 1961.

Ketiga, penjurusan di SMA mulai dilakukan di kelas II dan menghapus jurusan A, B, dan C dengan mengganti jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Keempat, kurikulum SMA tahun 1961 disebut “Kurikulum Gaya Baru” atau “Kurikulum SMA Gaya Baru”. Kurikulum SMA 1964 dikembangkan, karena pengaruh kehidupan politik pada waktu itu, dan kurikulum SMA 1961 berubah menjadi kurikulum SMA 1964 atau yang terkenal dengan sebutan Kurikulum Pancawardhana. Perubahan ini menunjukkan bahwa tujuan SMA semakin kompleks, tidak hanya untuk meneruskan ke perguruan tinggi tetapi juga terjun ke semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sekolah. Periode ini ditandai dengan kuatnya pengaruh politik dalam kurikulum SMA. Kurikulum Pancawardhana hanya berlangsung sampai tahun 1967, hal ini disebabkan adanya kritik dari berbagai pihak bahwa kurikulum SMA 1964 kurang memiliki bobot akademis yang memadai.

Kurikulum Gaya Baru dan Pancawardhana sebenarnya dapat berjalan dengan baik bila ditunjang oleh ketersediaan guru untuk semua mata pelajaran; kondisi sekolah dan fasilitas cukup baik; dan keadaan ekonomi negara stabil dan mantap. Pelaksanaan kurikulum SMA Pancawardhana ditandai pula dengan peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965.

B. Profil Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde Baru

Penanaman nilai-nilai moral yang cenderung hegemonik dari negara melalui proses pendidikan pada era Orde Baru mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973 menyebut perlunya kurikulum di semua tingkat pendidikan berisikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Meskipun sebutan Moral Pancasila dilekatkan untuk Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun materi-materi dalam masing-masing pokok bahasan, nampak bernuansa *Civics* seperti Kurikulum 1968 (Samsuri, 2010: 117).

Sejak GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998 pada era Orde Baru, pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dibebankan terutama pada Pendidikan Kewarganegaraan, serta sejumlah mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, serta P4. Semua mata pelajaran tersebut bersifat *top-down*. Menurut Udin S. Winataputra:

GBHN 1973 mengamanatkan bahwa kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila, dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. (wawancara, 6 Agustus 2011).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta (GBHN 1978).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat (GBHN 1983).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta (GBHN 1988).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya nilai-nilai 1945, dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah (GBHN 1993).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman dan Penghayatan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah sehingga

terbentuk watak bangsa yang kokoh (GBHN 1998). Selama Orde Baru telah terjadi pergantian kurikulum sampai empat kali, yaitu Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994.

a. Kurikulum 1968

Departemen P dan K pada tahun 1968 menerbitkan buku Pedoman Kurikulum Sekolah Dasar yang dinamakan Kurikulum SD, sebagai reaksi terhadap Rencana Pendidikan TK dan SD yang di dalamnya berbau politik ORLA (Orde Lama). Perubahan-perubahan terletak pada landasan pendidikannya yang berdasarkan Falsafah Negara Pancasila. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 memberikan arah pada reformasi pendidikan, berikut ini beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya:

...(1) Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila (Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 Bab II Pasal 2). (2) Tujuan pendidikan nasional ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945 (Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3). (3) Isi pendidikan nasional adalah: (a) Mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. (b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. (c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. (Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 4).

Kurikulum Sekolah Dasar 1968 dibagi menjadi 3 kelompok besar: (1) Kelompok Pembinaan Pancasila: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Olahraga. (2) Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar: Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan Kesehatan. (3) Kelompok Kecakapan Khusus: Kejuruan Agraria (Pertanian, Peternakan, Perikanan), Kejuruan Teknik (Pekerjaan Tangan, Perbengkelan), Kejuruan Ketatalaksanaan/Jasa (Kurikulum 1968).

Dengan berakhirnya rezim Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, sesuai dengan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai “membentuk manusia Pancasila sejati” berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945. Isi pendidikan adalah mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina/ memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Inilah isi dari kurikulum 1968. Selanjutnya TAP MPRS tersebut juga menegaskan mengenai kebebasan mimbar/ilmiah seluas-luasnya di perguruan tinggi yang tidak menyimpang dari UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Semua sekolah asing dilarang di

seluruh Indonesia. Demikian pula pemerintah memperhatikan perkembangan gerakan Pramuka. Mengenai lembaga pendidikan disederhanakan baik mengenai jumlah maupun strukturnya. Yang menarik antara lain, di dalam TAP MPRS tersebut ialah karena kekurangan tenaga mengajar perlu diadakan langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain dengan undang-undang wajib mengajar. Abd. Rachman Assegaf (2005: 141), menyatakan:

Dengan dibubarkannya PKI pada tahun 1965, ide Manipol diganti dengan upaya pemurnian Pancasila, dimana hal ini mengakibatkan seluruh pembagian mata pelajaran ke dalam kelompok-kelompok yang menjabarkan ide Manipol, seperti Pancawardhana dan Sapta Usaha Tama, atau kelompok mata pelajaran Rasa/Karya yang bertujuan membentuk Sosialisme Indonesia, diganti menjadi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) Kelompok pembinaan jiwa Pancasila. (2) Kelompok pembinaan pengetahuan dasar. (3) Kelompok pembinaan kecakapan khusus. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (termasuk Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan *Civics*), Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olah Raga. Kurikulum 1968 telah menyebutkan rincian bahan, tujuan, dedaktik/metodik serta petunjuk bagi guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Tabel 10
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah Sampai Kelas III

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Pembinaan Jiwa Pancasila						
	1. Pendidikan Agama	2	2	3	4	4	4
	2. Pend. Kewargaan Negara.	2	2	4	4	4	4
	3. Pend. Bhs. Indonesia	-	-	6	6	6	6
	4. Bahasa Daerah	8	8	2	2	2	2
	5. Pend. Olahraga	2	2	3	3	3	3
	Sub Jumlah	14	14	18	19	19	19
II	Pembinaan Penget. Dasar						
	6. Berhitung	7	7	7	6	6	6
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4
	8. Pendidikan Kesenian	2	2	4	4	4	4
	9. Pend. Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	17	16	16	16
III	Pemb. Kecakapan Khusus						
	10. Pendidikan Khusus 2)	2	2	5	5	5	5
	Jumlah	28	28	40	40	40	40

Sumber:Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Pendidikan Kewargaan Negara masuk dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, diberikan 4 jam perminggu untuk kelas III sampai dengan kelas VI, dan 2 jam untuk kelas I dan II.

Tabel 11
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia Mulai Kelas I

No	Bidang Studi	Kel. I	Kel. II	Kel. III	Kel. IV	Kel. V	Kel. VI
I	Pembinaan Jiwa Pancasila						
	1. Pendidikan Agama	2	2	4	4	4	4
	2. Pend. Kewargaan Neg.	2	2	4	4	4	4
	3. Pend. Bhs. Indonesia	4	4	6	6	6	6
	4. Bahasa Daerah	4	4	2	2	2	2
	5. Pend. Olahraga	2	2	3	3	3	3
	Sub Jumlah	14	14	19	19	19	19
II	Pembinaan Penget. Dasar						
	6. Berhitung	7	7	7	7	7	7
	7. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	4	4	4	4
	8. Pendidikan Kesenian	2	2	3	3	3	3
	9. Pend. Kesejahteraan Keluarga	1	1	2	2	2	2
	Sub Jumlah	12	12	16	16	16	16
III	Pemb. Kecakapan Khusus						
	10. Pendidikan Khusus 2)	2	2	5	5	5	5
	Jumlah	28	28	40	40	40	40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tanggal 2 Agustus 1968 No. 342/UKK/68, Rencana Pendidikan SMP yang telah disempurnakan, maka Kurikulum SMP 1968 mulai berlaku pada awal tahun ajaran 1968. Faktor politis lebih berpengaruh dalam penyempurnaan Rencana Pendidikan tersebut dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Penyusunan Rencana Pendidikan dikoordinasikan oleh Kantor Pusat, dalam hal ini Dinas SMP.

Susunan program pengajaran dalam Rencana Pendidikan yang disempurnakan tahun 1967 dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. *Pertama*: Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila; kelompok ini berfungsi untuk membina dan mempertinggi moral Pancasila, UUD 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat. Usaha ini diarahkan pada pembentukan jiwa yang sehat dan kuat. Dengan jiwa yang sehat diharapkan dapat meningkatkan keyakinan beragama, keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral Pancasila

sesuai dengan Ketetapan (TAP) MPRS No. XVII/MPRS/1966, yaitu agar warga negara berbudi bahasa halus dan pandai menyesuaikan diri, berdisiplin, dan berwatak sportif. Demikian juga halnya dengan raga yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan meningkatkan kecekatan bertindak. Rencana pelajaran dan kegiatan formal yang menunjang usaha tersebut ialah Pendidikan Agama, Kewargaan Negara, Bahasa Indonesia, dan Olahraga.

Kedua: Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar; dasar pemikiran kelompok mata pelajaran ini ialah bahwa akal pikiran merupakan salah satu karunia Tuhan yang menempatkan kedudukan manusia di atas makhluk lain di dunia. Akal pikiran yang dibimbing dan dilatih dapat menjadikan manusia bersikap kritis dan selalu ingin mengetahui berbagai hal. Dengan sifat inilah maka manusia mampu mengetahui dan mengenal lingkungannya baik mengenai bentuk, sifat, maupun hukum-hukumnya sehingga dapat memanfaatkannya untuk mempertinggi kesejahteraan hidup. Dengan demikian semua pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dapat mendorong manusia untuk mengakui dan meyakini adanya kekuatan yang mengatur hukum alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok mata pelajaran ini bertujuan memberikan berbagai pengetahuan dasar yang berguna bagi anak didik untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran yang termasuk kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar ialah Ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur (untuk meningkatkan sikap kritis), Ilmu Alam, Ilmu Hayat, dan Ilmu Bumi (untuk mengetahui manfaat yang mungkin berguna bagi kehidupan manusia), Sejarah (untuk mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan bangsa sehingga menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk bersatu), Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris (merupakan media untuk menemukan dan mengembangkan kebudayaan guna meningkatkan kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan kesempurnaan hidup sebagai makhluk tertinggi), dan menggambar (merupakan mata pelajaran yang dapat mengembangkan daya cipta, rasa estetika, keterampilan, dan rasa realitas sehingga siswa kelak dapat menciptakan bentuk, warna, keindahan, keseimbangan, dan keharmonisan).

Ketiga: Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus; dasar pemikiran diadakannya kelompok mata pelajaran ini ialah bahwa di SMP tidak cukup hanya diberikan pendidikan mental, spiritual, fisik dan kecerdasan saja, tetapi diperlukan juga pendidikan keterampilan yang praktis, pendidikan emosional, dan pendidikan artistik serta sosial. Kelompok ini bertujuan memberikan keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup dalam masyarakat. Mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok ini ialah Administrasi (memberikan keterampilan

untuk menyelenggarakan administrasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari). Prakarya (memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya masing-masing). Pendidikan Kesenian (memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan bakat seni mereka, dengan harapan kesenian baik daerah maupun nasional dapat dipupuk dan dilestarikan). Selain itu pendidikan kesenian juga bertujuan untuk meningkatkan rasa haru dan rasa indah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dimaksudkan untuk memperdalam kesadaran siswa akan perlunya hidup rukun, damai, hemat, cermat, sehat, serta sejahtera dalam kehidupan keluarga. Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi siswa untuk bekerja dan berkarya serta lebih mengenal bakat masing-masing. Di SMP hal ini mungkin belum dapat menghasilkan penguasaan materi secara bulat dan lengkap, tetapi bagi siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi merupakan pengetahuan dasar yang berguna bagi kehidupan siswa sehingga mereka dapat menjadi manusia yang produktif dalam pembangunan.

Perlu dicatat bahwa semua mata pelajaran yang diberikan di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling menunjang dan melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan di SMP. Kesatuan semua mata pelajaran tersebut ditunjukkan dalam susunan program pengajaran dalam Kurikulum SMP 1968. Susunan mata pelajaran kurikulum SMP 1968 sebagai berikut:

Tabel 12
Susunan Mata Pelajaran SMP
Tahun 1968

Kelp.	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
A	Kelompok Pemb. Jiwa Pancasila			
	1. Pendidikan Agama	3	3	3
	2. Pend Kewargaan Negara	3	3	3
	3. Bahasa Indonesia (I)	3	3	3
	4. Olahraga	2	2	2
	Sub Jumlah	11	11	11
B	Klp. Pembinaan Pengetahuan Dasar			
	1. Bahasa Indonesia (II)	2	2	2
	2. Bahasa Daerah	2	2	2
	3. Ilmu Inggris	3	3	3
	4. Ilmu Aljabar	3	3	3
	5. Ilmu Ukur	3	3	3
	6. Ilmu Alam	3	3	3
	7. Ilmu Hayat	2	2	2
	8. Sejarah Bumi	2	2	2
	9. Sejarah	2	2	2
	Sub Jumlah	24	24	24
C	Klp. Pembinaan Kecakapan Khusus			

1. Administrasi	1	1	1
2. Kesenian	2	2	2
3. Prakarya	2	2	2
4. Kesejahteraan Keluarga	1	1	1
Sub Jumlah	6	6	6
Jumlah	41	41	41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1989, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SMP Pendidikan Kewargaan Negara masuk dalam kelompok “Pembinaan Jiwa Pancasila”, diberikan masing-masing 3 jam perminggu untuk kelas I sampai dengan kelas III .

b. Kurikulum PKn 1975

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968. Perbedaan kecil hanya pada penambahan kajian tentang pembangunan nasional dan GBHN pada PMP dalam Kurikulum 1975.

Tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar adalah sebagai berikut:

- (1) Murid mengerti arti ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945.
- (3) Murid dapat mengerti prinsip dasar hak-hak asasi manusia, serta tanggungjawab yang terjalin dengan hak-hak tersebut.
- (4) Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945.
- (5) Murid mengerti arti kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
- (6) Murid mengetahui, mengenal kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan rasa bhineka tunggal ika.
- (7) Murid mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- (8) Murid mengetahui dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- (9) Murid mengerti dan mampu menggunakan dasar-dasar hak kewargaan negaranya.
- (10) Murid memahami bentuk dan dasar negara RI, sehingga murid mampu berpartisipasi sebagai warga negara.
- (11) Murid mengetahui dan mempraktekan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah dan masyarakat. (Diolah dari Depdikbud, 1976a: 3-11).

Tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk SMP adalah sebagai berikut:

- (1) Siswa menyadari adanya bermacam-macam agama, dan saling menghargai antara para pemeluknya.
- (2) Siswa memahami dan mengamalkan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Siswa mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- (4) Siswa mengetahui, memahami dan menghayati prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- (5) Siswa mengetahui perkembangan sejarah nasional Indonesia.
- (6) Siswa menunjukkan sikap dan tindakan yang mendukung kesatuan nasional.
- (7) Siswa mengerti, mentaati dan melaksanakan peraturan untuk memajukan kehidupan masyarakat.
- (8) Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.
- (9) Siswa mentaati peraturan-peraturan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan masyarakat.
- (10) Siswa mengetahui dan menyadari pentingnya arti persatuan dan kesatuan nasional Indonesia, sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- (11) Siswa memahami

dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat. (12) Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD 1945. (13) Siswa memahami prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. (14) Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. (15) Siswa mengetahui bahwa GBHN adalah merupakan landasan pembangunan nasional. (Diolah dari Depdikbud, 1976b: 2-7).

Sedangkan tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk SMA adalah sebagai berikut:

(1) Siswa memahami Tuhan Yang Maha Esa adalah sebab pertama (*causa prima*), sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang. (2) Siswa memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 29 UUD 1945. (3) Siswa menghargai sesama manusia dan memiliki sikap saling menghormati dalam pergaulan antar bangsa. (4) Siswa memahami prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. (5) Siswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. (6) Siswa mengetahui dan memahami pentingnya arti kesatuan dan persatuan nasional. (7) Siswa mengerti sistem pertahanan dan keamanan nasional. (8) Siswa mengerti ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk memajukan masyarakat dan keamanan nasional serta ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. (9) Siswa mengetahui dan menyadari arti kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. (10) Siswa memahami dan menyadari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, supaya mampu untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. (11) Siswa mengetahui dan mengerti sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. (12) Siswa memahami dan menyadari pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat. (13) Siswa memahami dan menghayati Pancasila dan UUD 1945. (14) Siswa memahami prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. (15) Siswa mampu menggunakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. (16) Siswa memahami dasar dan tujuan kehidupan sosial ekonomi Indonesia dan berusaha berpartisipasi untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. (17) Siswa berusaha melaksanakan prinsip keadilan sosial. (Diolah dari Depdikbud, 1978: 2-5).

Usaha untuk memperbaiki kurikulum pendidikan sudah lama dirasakan kebutuhannya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, berbagai percobaan misalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar banyak dilaksanakan. Antara lain yang terkenal ialah usaha Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan dan Pengajaran (BP4) dipimpin oleh H.S. Adam Bachtiar sejak tahun 1951 mengadakan sekolah-sekolah percobaan. Sekolah-sekolah tersebut yaitu sekolah rakyat percobaan di Jakarta mengenai pengelompokan murid berdasarkan prestasi belajar, di Denpasar untuk sekolah masyarakat; Bandung untuk *science teaching* dan pendidikan agama Islam; Bukit Tinggi mengenai pertanian sebagai mata pelajaran. Usaha-usaha Adam Bachtiar ini kemudian dilanjutkan oleh IP Simanjuntak setelah terbentuknya Jawatan Pendidikan

Umum tahun 1957. Sayangnya usaha-usaha percobaan ini tidak pernah dievaluasi sehingga tidak pernah didesiminasikan (Depdikbud, 1976: 14).

Usaha yang kedua dimulai pada Pelita I yaitu Pengharusan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta; bahasa Sunda di Bandung; kesenian di Yogyakarta; IPS di Surabaya; IPA di Malang; dan sekolah laboratorium IKIP Malang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Supartinah Pakasi. Hasil sekolah laboratorium IKIP Malang inilah yang merupakan salah satu masukan kurikulum 1975 (Depdikbud, 1976: 15).

Dalam Pelita I Menteri Mashuri (Depdikbud, 1976: 15), mengemukakan *basic memorandum* tentang pendidikan. Dalam dokumen tersebut digariskan mengenai syarat-syarat sekolah-sekolah di Indonesia sebagai berikut:

... (1) Sekolah itu hendaknya merupakan bagian integral dari masyarakat sekitarnya. Sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, sekolah itu hendaknya mempunyai dwifungsi: mampu memberikan pendidikan formil dan juga pendidikan informil, baik untuk para pemuda maupun untuk orang dewasa pria wanita. (2) Sekolah itu hendaknya berorientasikan kepada pembangunan dan kemajuan, sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang. (3) Sekolah itu hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar dan program yang menyenangkan, menantang dan cocok dengan tujuannya.

Dari kebijakan pendidikan inilah lahir apa yang disebut Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Seperti kita ketahui pada tahun 1973 lahirlah GBHN yang pertama sebagai Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Berdasarkan TAP MPR inilah disusun kurikulum 1975. Seperti kita ketahui kurikulum-kurikulum sebelumnya disusun berdasarkan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950, kemudian mendasarkannya kepada TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan keputusan-keputusan lainnya. Dengan sendirinya di dalam masa Orde Baru kita memerlukan kurikulum yang sesuai dengan jiwa pembangunan pada masa itu.

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru diiringi dengan perubahan-perubahan mendasar di bidang pendidikan. Beberapa faktor yang muncul sejak tahun 1969 dan yang mempengaruhi perubahan ke arah terbentuknya Kurikulum 1975 adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan pembaharuan pendidikan selama Repelita I yang dimulai pada tahun 1969 telah melahirkan dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan nasional. (2) Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menuntut implementasinya di lapangan. (3) Hasil analisis dan

penilaian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan nasional. (4) Inovasi di dalam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. (5) Keluhan-keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau sistem yang saat itu sedang berlaku. Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya dilakukan peninjauan kurikulum agar lebih sesuai dengan tuntutan perubahan dan lebih efisien di dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Depdikbud, 1976: 16). Karena beberapa faktor di atas, maka Kurikulum 1975 muncul dengan berbagai pembaharuan fundamental, yang di masa berikutnya Kurikulum 1975 ini menjadi basis bagi upaya penyempurnaan kurikulum selanjutnya.

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 143-144), aspek-aspek baru yang dijumpai dalam kurikulum ini antara lain adalah:

Pertama, pembakuan Kurikulum 1975 dilakukan dengan menggunakan prinsip fleksibilitas program, yaitu dengan mempertimbangkan faktor ekosistem lingkungan, kemampuan pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi berlangsungnya program tersebut, prinsip efisiensi dan efektifitas, yaitu menyangkut penggunaan waktu secara tepat dan pendayagunaan tenaga secara optimal. Prinsip berorientasi pada tujuan yakni agar tiap jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru benar-benar terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip kontinuitas, yaitu agar penyusunan kegiatan belajar mengajar selalu memperhatikan hubungan fungsional dan hirarkhis sehingga tidak terjadi pengulangan yang membosankan atau pemberian pelajaran yang tak dapat dipahami oleh siswa karena mereka tidak memiliki dasar yang kokoh, dan prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa masa sekolah bukanlah masa satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup.

Kedua, sistem penyajian Kurikulum 1975 mulai memperkenalkan penggunaan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). Dalam realisasinya pola ini menghasilkan penerapan Satuan Pelajaran (Satpel, *unit lesson*) sebagai rencana atau persiapan mengajar guru sebelum masuk kelas. Di samping itu, Satpel ini memuat rincian mengenai Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), ringkasan materi pelajaran, proses kegiatan belajar mengajar, metode mengajar, alat/sumber serta evaluasi. Dengan demikian Satpel mencerminkan makna kurikulum yang komprehensif karena meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Dengan Satpel pula dapat dihindarkan problem ketidak seragaman kurikulum pendidikan bagi guru yang mengajar di sekolah. Yang demikian ini tidak dijumpai dalam kurikulum 1968.

Ketiga, Kurikulum 1975 dirancang untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dalam Repelita II (1974-1979). Satu hal yang istimewa pada Repelita II atau dasawarsa 1970-an ini adalah terjadinya *oil boom* di Indonesia sehingga mampu menaikkan APBN bidang pendidikan sampai dua kali anggaran tahun 1974/1975.

Pada dasawarsa ini pembangunan sektor pendidikan diarahkan pada aspek pemerataan pendidikan dasar dengan memperluas daya tampung sekolah di seluruh pelosok Nusantara. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 143-144).

Menurut A. Ahmadi (1987: 270), latar belakang lahirnya Kurikulum 1975 adalah sebagai berikut:

Sebelum diberlakukannya kurikulum 1975, telah diberlakukan kurikulum 1968. Namun karena pada saat dirumuskannya kurikulum 1968 belum dapat menghimpun segala keutuhan pendidikan, misalnya tentang tujuan nasional pendidikan yang berorientasi pada pembangunan bangsa (tujuan nasional pendidikan yang demikian baru dirumuskan dalam GBHN hasil TAP MPR tahun 1973), maka kurikulum 1968 tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, di samping berjalan kurikulum 1968, juga kurikulum menurut sistematik buku-buku hasil proyek pengadaan buku dan kurikulum sesuai dengan kemampuan masing-masing guru. Kondisi semacam itu sangat membingungkan guru, orang tua murid, dan masyarakat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta relevansi pendidikan, dimulailah proses pembakuan kurikulum pada tahun 1974, yang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dimulai sejak tahun 1969. Sebagai hasilnya lahirlah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi pada tujuan pendidikannya sebagai manusia pembangunan.

Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama yang dikembangkan pada periode PJP I. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan sebagai perimbangan dari perluasan persekolahan, khususnya di SD, yang mulai dilakukan sejak awal tahun 1970-an. Pembakuan kurikulum 1975, pada dasarnya dilakukan untuk penyempurnaan Kurikulum 1968, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan zaman. Tujuan pendidikan berdasarkan Kurikulum 1975 dirumuskan berdasarkan Ketetapan MPR NO. IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973 yaitu membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. Sesuai dengan fungsi pembangunan nasional PJP I, maka Kurikulum 1975, pada waktu itu benar-benar dibutuhkan keberadaannya dalam rangka membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang.

(1) Kurikulum SD 1975

Dalam pengantar Kurikulum SD 1975 (Depdikbud, 1975: 2), tujuan umum pendidikan Sekolah Dasar adalah:

Membentuk lulusan yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Kurikulum SD 1975 berorientasi kepada tujuan dengan menganut prinsip-prinsip fleksibilitas program, efisiensi dan efektivitas, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Fleksibilitas program menunjukkan bahwa penyusunan program pengajaran pada setiap bidang studi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Melalui prinsip pendidikan seumur hidup diharapkan agar materi dan proses belajar mengajar setiap bidang studi memiliki kesinambungan sehingga bahan-bahan pelajaran benar-benar dapat menyatu dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Prinsip efisiensi dan efektivitas dimaksudkan agar mata pelajaran diorganisasikan secara terpadu dalam bidang-bidang studi sehingga demarkasi antara mata pelajaran yang terpisah tidak terlalu kentara. Hal ini tercermin dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) bahwa program pengajaran disusun sesuai dengan masing-masing bidang studi. Bidang studi agama terdiri dari lima macam program yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Bidang studi kesenian terdiri dari tiga unsur yaitu seni rupa termasuk menggambar, seni musik, dan seni tari. Bidang studi keterampilan meliputi tujuh bidang yaitu jasa, kerajinan, teknik, pendidikan kesejahteraan keluarga, pertanian, peternakan, dan perikanan. Bidang studi IPA meliputi materi pelajaran fisika dan biologi, dan bidang studi IPS terdiri dari ilmu bumi, kewarganegaraan, ekonomi, dan sejarah.

Struktur Program Kurikulum SD 1975 berbeda dengan Kurikulum SD 1968, yang membedakan struktur program menjadi dua yaitu sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah. Kurikulum SD 1975 hanya mempunyai satu struktur program yang mencakup sembilan bidang studi, yaitu: (1) Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Bahasa Indonesia; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5) Matematika; (6) Ilmu Pengetahuan Alam; (7) Olahraga dan Kesehatan; (8) Kesenian; dan (9) Keterampilan Khusus. Struktur program Kurikulum dan pembagian jam pelajaran setiap bidang studi untuk masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Sekolah Dasar
Tahun 1975

No	Bidang Studi	Kl. I	Kl. II	Kl. III	Kl. IV	Kl. V	Kl. VI	Jumlah
1	Agama	2	2	2	3	3	3	15
2	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
3	Bahasa Indonesia	8	8	8	8	8	8	48
4	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	2	2	2	2	8
5	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
6	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	3	4	4	4	19
7	Olahraga dan Kesehatan	2	2	3	4	4	4	19
8	Kesenian	2	2	3	4	4	4	19
9	Keterampilan Khusus	2	2	4	4	4	4	20
	Jumlah	26	26	33	37	37	37	196

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

(2) Kurikulum SMP 1975

Sebagaimana di SD mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) juga diberikan di SMP. Sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut, maka dilakukan penyusunan kurikulum SMP yang disebut Kurikulum SMP 1975, yang merupakan Kurikulum SMP 1968 yang disempurnakan. Istilah SMP yang disempurnakan ini lahir dari gagasan untuk mengintegrasikan sekolah-sekolah menengah kejuruan tingkat pertama (SMKTP), secara berangsur-angsur dengan SMP. Proses integrasi SMP dengan SMKTP menjadi SMP yang disempurnakan diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 084/U/1975. Agar kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kurikulum maka dalam Kurikulum 1975 disusun Penjelasan Umum dan Penjelasan Khusus. Penjelasan Umum dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pelaksana (guru, tenaga administrasi, dan supervisi) tentang beberapa pengertian yang menyangkut kurikulum SMP 1975 khususnya mengenai sistematika, struktur program, garis-garis besar program pengajaran, sistem penyajian yang akan digunakan, dan sistem evaluasi yang akan digunakan. Penjelasan khusus merupakan pedoman bagi setiap bidang studi, ruang lingkup, dan tata urutan bahan pengajaran, pendekatan, metode penyampaian, kelengkapan pengajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Dalam pengantarnya (Depdikbud, 1975) dijelaskan bahwa:

Kurikulum SMP 1975, meliputi tiga program pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keterampilan. Program pendidikan umum wajib diikuti oleh semua siswa dan meliputi empat bidang studi, yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan (4) Pendidikan Kesenian. Program pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua siswa yang meliputi enam bidang studi, yaitu: (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Daerah khususnya bagi sekolah di daerah yang masih memerlukan pelajaran Bahasa Daerah; (3) Bahasa Inggris; (4) IPS; (5) Matematika; dan (6) IPA. Program pendidikan keterampilan terdiri dari pendidikan keterampilan terikat yang dapat dipilih di antara bidang-bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, teknik, jasa, agraria, maritim, dan kerajinan, serta pendidikan keterampilan pilihan bebas yang dapat dipilih di antara praktikum ilmu alam, ilmu hayat, konservasi, olahraga prestasi, kesenian, dan usaha kesehatan sekolah (UKS). Dalam Kurikulum SMP 1975, pendidikan kependudukan diintegrasikan ke dalam bidang studi yang relevan, yaitu IPS.

Kurikulum SMP 1975 dilaksanakan secara bertahap dan mulai berlaku pada tahun ajaran 1976 di kelas I. Pada tahun ajaran 1977 dilaksanakan di kelas I dan II, dan pada tahun ajaran 1978 berlaku dari kelas I sampai III, sehingga pada tahun ajaran 1979 berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai kelas III untuk semua SMP. Tahap pelaksanaan tersebut dilakukan secara nasional dengan memberikan kemungkinan bahwa SMP yang menurut penilaian Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat secara teknis dan administratif telah mampu, dapat melaksanakan Kurikulum SMP 1975 mulai tahun ajaran 1976.

Tabel 14
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP Tahun 1975

Program Pendidikan	Bidang Studi	KI I	KI I	KI II	KI II	KI III	KI III	
Pendidikan Umum	1. Pend Agama	2	2	2	2	2	2	
	2. PMP	2	2	2	2	2	2	
	3. Olahraga	3	3	3	3	3	3	
	4. Pen.Kesenian	2	2	2	2	2	2	
	Sub Jumlah	9	9	9	9	9	9	
Pendidikan Akademis	5. Bhs Indonesia	5	5	5	5	4	4	
	6. Bhs Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	-	-	
	7. Bhs Inggris	4	4	4	4	4	4	
	8. IPS	4	4	4	4	4	4	
	9. Matematika	5	5	5	5	5	5	
	10. IPA	4	4	4	4	4	4	
	Sub Jumlah	22	22	22	22	22	22	
		(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)	
	Pendidikan Keterampilan	11. Pilihan Terikat	6	-	6	-	6	-
		12. Pilihan Bebas	-	6	-	6	-	6
Jumlah		37	37	37	37	37	37	

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Di SMP Pendidikan Moral Pancasila masuk dalam program “Pendidikan Umum” diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

(3) Kurikulum SMA 1975

Sebagaimana di SD dan SMP Pendidikan Kewargaan Negara di SMA juga diganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Kurikulum SMA 1975 dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlanjut yang menuntut perubahan isi dan pendekatan. Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan (PPSP) dan beberapa studi pengembangan lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan secara nasional sehingga mengarah pada adanya tuntutan untuk menyempurnakan kurikulum SMA. Lebih dari itu, GBHN 1973 telah menggariskan bahwa pada bulan Mei 1974 dilakukan penyusunan kurikulum baru SMA atau yang dikenal dengan sebutan Kurikulum SMA 1975. Kurikulum ini diberlakukan atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008d/U/1975 dan Nomor 008c/U/1075 tanggal 17 Januari 1975.

Tujuan umum pendidikan SMA menurut Kurikulum 1975 (Dep. P dan K, 1975) adalah:

Menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin; menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan SMP; memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh program umum yang sama bagi semua siswa dan program pilihan bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi; dan memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil bidang studi keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya kurikulum SD dan SMP, ciri penting dari Kurikulum SMA 1975 adalah menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, dengan pendekatan integral. Pendidikan tentang moral yang sesuai dengan pelaksanaan sila-sila dari Pancasila tidak dibebankan pada mata pelajaran PMP; melainkan pada IPS dan pendidikan agama, dan menganut asas efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, daya, dan waktu. Kurikulum SMA 1975 disusun berdasarkan atas program pendidikan yang meliputi Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program Pendidikan Keterampilan. Penjurusan SMA dibagi menjadi tiga, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan sosial), dan Bahasa.

Tabel 15
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1975
Jurusan IPA

Mata Pelajaran	Masa Orient	Sifat	Mapel Jurusan	Kl I Sem 2	Kl II Sem 1	Kl II Sem 2	Kl III Sem 1	Kl III Sem 2
Pend Agama	2			2	2	2	2	2
PMP	2			2	2	2	2	2
Olah raga	2			2	2	2	2	2
Kesenian	2			2	2	2	-	-
Matematika	6	Wajib	Matematika	6	6	6	5	5
Bhs Indo.	5		Bhs Indo.	4	3	3	3	3
Bhs Inggris	4		Bhs Inggris	4	3	3	3	3
IPA	7	Mayor	Fisika	2	3	3	4	4
			Kimia	2	3	3	4	4
			Biologi	2	2	2	4	4
		Minor	Menggambar	-	-	-	-	-
			Bumi Antariksa	2	2	2	2	2
			Bahasa Asing	-	-	-	-	-
			Pilihan Pra Vokasional	4	4	4	-	-
			Pilihan Penunjang	3	3	3	7	7
	37		Jam/Minggu	37	37	37	36	36
	9		Juml Mapel	13	13	13	10	10

Sumber: Depdikbud. (1976). *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.

Di SMA jurusan IPA, IPS, maupun Bahasa, Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III. **c.**

Kurikulum PKn 1984

Pada tahun 1978 lahir Ketetapan MPR 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 semula ditujukan sebagai materi penataran untuk para pegawai negeri sipil (PNS), di samping materi UUD 1945 dan GBHN. Namun kepentingan politik rezim ketika itu akhirnya diperluas cakupannya untuk masyarakat secara luas. Pada akhirnya, kurikulum PMP Pasca lahirnya P4 diwajibkan memasukkan materi P4. Oleh pembuat kebijakan pendidikan dasar dan menengah ketika itu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Darji Darmodiharjo dikatakan bahwa materi penataran P4 untuk PNS pada hakekatnya sama dengan materi PMP untuk para siswa. Perbedaannya, PMP adalah “penataran P4” untuk peserta jenjang pendidikan formal, sedangkan penataran P4 itu sendiri untuk masyarakat luas termasuk PNS. Perkembangan berikutnya, materi PMP disesuaikan dengan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4. (Samsuri, 2010: 123).

Kurikulum 1984 adalah merupakan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Mata pelajaran PMP tetap muncul dalam kurikulum 1984. Asumsi yang mendasari pengembangan Kurikulum 1984 ialah bahwa kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dievaluasi dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, secara periodik kurikulum akan berubah disesuaikan dengan kondisi, walaupun perubahannya tidak selalu mendasar. Kurikulum 1984 lahir didasarkan pada amanat GBHN 1983 yakni Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 yang menegaskan bahwa:

“...Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, yang memerlukan beberapa jenis keahlian dan keterampilan serta sekaligus meningkatkan kreativitas, mutu dan efisiensi kerja”. (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983).

Kurikulum 1984 mengacu pada empat aspek perkembangan murid yang dijabarkan di dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983. Keempat aspek penyempurnaan tersebut meliputi: (1) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; (2) Penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum; (3) Pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (4) Pelaksanaan pelajaran yang mengarah pada ketuntasan belajar dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik.

(1) Kurikulum SD 1984

Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas VI. Dalam pengantar Kurikulum SD 1984 (Depdikbud, 1984) kita temukan tujuan pendidikan di SD sebagai berikut:

Tujuan SD adalah mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa; memberi bekal kemampuan yang diperlukan oleh murid untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi; dan memberi bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Program pendidikan SD dilaksanakan selama enam tahun dan setiap tahunnya terdiri dari tiga catur wulan.

Tema pembenahan dan pengembangan kurikulum yang dianut ialah perubahan pola, penyederhanaan bahan kurikulum dan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi pembangunan pendidikan. Sesuai dengan pembakuan kurikulum Sekolah Dasar tersebut, pembagian struktur program mencakup 11 bidang studi yaitu, Pendidikan Agama, Pendidikan

Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Keterampilan Khusus, dan Bahasa Daerah.

Tabel 16
Susunan Program Pengajaran Kurikulum Sekolah Dasar
Tahun 1984

No	Bidang Studi	KI I	KI II	KI III	KI IV	KL V	KI VI	Jml
1	Pend. Agama	2	2	2	3	3	3	15
2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
3	PSPB	1	1	1	1	1	1	6
4	Bhs. Indonesia	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	48/42
5	IPS	-	-	2	3	3	3	11
6	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
7	IPA	2	2	3	4	4	4	19
8	Olahraga dan Kesehatan	2	2	3	3	3	3	16
9	Kesenian	2	2	3	3	3	3	16
10	Keteramp Khusus	2	2	4	4	4	4	20
11	Bhs. Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(12)
	Jumlah	26/27	26/27	33/33	33/37	36/37	36/37	193/199

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum sekolah dasar tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

(2) Kurikulum SMP 1984

Di SMP mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas III. Dalam pengantar Kurikulum SMP 1984 (Depdikbud, 1984) kita temukan tujuan pendidikan di SMP sebagai berikut:

Kurikulum SMP 1984 diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan SMP untuk mendidik siswa menjadi manusia pembangunan dan warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945; memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan bekal keterampilan dasar untuk memasuki kehidupan di masyarakat sesuai dengan minat, kemampuan, dan lingkungannya. Dalam Kurikulum 1984 dikenal istilah tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional, sebagaimana dalam kurikulum sekolah 1975.

Lama pendidikan di SMP adalah tiga tahun, dan setiap tahunnya terdiri dari dua semester sehingga seluruhnya berjumlah enam semester. Program pendidikan pada Kurikulum SMP 1984

terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu: Program Pendidikan Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Program pendidikan Keterampilan yang diartikan sama dengan Kurikulum SMP 1975 tetapi komposisi mata pelajaran yang sedikit berbeda.

Program Pendidikan Umum terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMP yang pertama, yaitu mendidik manusia pembangunan, sebagai warga negara Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945. Program ini terdiri dari lima bidang studi yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikan Moral Pancasila; (3) Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa; (4) Pendidikan Jasmani; dan (5) Pendidikan Keseniaan. Program pendidikan umum wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih ditekankan pada penanaman sikap. Program Pendidikan Akademis terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMP yang kedua, yaitu memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi. Program pendidikan akademis terdiri atas enam bidang studi yaitu: (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Bahasa Daerah; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5) Matematika; dan (6) Ilmu pengetahuan Alam. Program pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua siswa dan lebih diarahkan pada pemahaman kemampuan akademis. Jumlah jam per minggu pendidikan akademis untuk setiap kelas adalah 25 jam untuk semester ganjil dan 23 jam untuk semester genap dan ditambah 2 jam bila sekolah memberikan pelajaran Bahasa Daerah.

Tabel 17
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP
Tahun 1984

No	Bidang Studi	KI I Sm 1	KI I Sm 2	KI II Sm 2	KI II Sm 2	KI III Sm 1	KI III Sm 2	Jml
	Pendidikan Umum							
1	Pend. Agama	2	2	2	2	2	2	12
2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
3	PSPB	-	2	-	2	-	2	6
4	Pend Jasmani	3	3	3	3	3	3	18
5	Pend Kesenian	2	2	2	2	2	2	12
	Sub Jumlah	9	11	9	11	9	11	60
	Pend Akademis							
6	Bhs Indonesia	5	5	5	5	5	5	30
7	Bhs Inggris	4	4	4	4	4	4	24
8	Bhs Daerah	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(12)
9	IPS	4	4	4	4	4	4	24
10	Matematika	6	4	6	4	6	4	30
11	IPA							
	a. Biologi	3	3	3	3	3	3	18
	b. Fisika	3	3	3	3	3	3	18
	Sub Jumlah	25	23	25	23	25	23	144

		(27)	(25)	(27)	(25)	(27)	(25)	(156)
	Pend Keterampilan							
12	Pend Keteramp	4	4	4	4	4	4	24
	Juml Jam/Minggu	38	38	38	38	38	38	228
		(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(240)

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum SMP tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

(3) Kurikulum SMA 1984

Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, sejak dari kelas I sampai dengan kelas III. Kurikulum SMA 1984 mempunyai tiga hal penting yaitu, ciri-ciri, tujuan pendidikan, dan struktur program. Ciri-ciri kurikulum SMA 1984 adalah menganut asas keluwesan dalam pengelolaan program, menggunakan sistem kredit semester, dan menerapkan bimbingan karier siswa. Sedangkan tujuan pendidikan SMA adalah mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan dan warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan UUD 1945, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terutama di universitas dan institut, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, akademi, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat, dan memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Struktur program pendidikan dipersiapkan untuk pendidikan SMA tiga tahun dan setiap tahun pelajaran terbagi menjadi dua semester. Lingkup program SMA terdiri dari program inti dan program pilihan. Program inti, wajib diikuti oleh semua siswa, sedangkan program pilihan disediakan untuk siswa berdasarkan pilihannya sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Program inti mencakup 60 persen atau 134 kredit dan program pilihan 40 persen atau 88 kredit dari keseluruhan program SMA sebanyak 222 kredit. Program inti terdiri dari 15 mata pelajaran dan program pilihan bervariasi menurut program masing-masing. Program pilihan terdiri dari Program Pilihan A yang diarahkan untuk kepentingan melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu program A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya), dan A5 (Ilmu Agama). Program Pilihan B disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan bidang kehidupan yang ada di masyarakat, yaitu teknologi industri, komputer, pertanian, kehutanan, jasa, kesejahteraan keluarga, maritim, budaya, dan pengetahuan agama. Struktur program berdasarkan program pendidikan di SMA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1984
(Program Inti dan Program Ilmu-Ilmu Fisik)

Prog	No	Mapel	Kl.1 Sem1	Kl.1 Sem 2	Kl. 2 Sem 1	Kl. 2 Sem 2	Kl. 3 Sem 1	Kl. 3 Sem2	Jml
Inti	1	P. Agama	2	2	2	2	2	2	12
	2	PMP	2	2	2	2	2	2	12
	3	PSPB	2	-	2	-	2	-	6
	4	Bhs Indo	4	4	3	3	2	2	18
	5	Sejarah	3	3	2	2	2	2	14
	6	Ekonomi	3	3	-	-	-	-	6
	7	Geografi	-	-	2	2	3	3	10
	8	P. Jasmani	2	2	2	2	-	-	8
	9	P. Seni	3	3	2	2	-	-	10
	10	P. Keteramp	2	4	2	2	-	-	10
	11	Matematika	4	4	-	-	-	-	8
	12	Biologi	3	3	-	-	-	-	6
	13	Fisika	2	2	-	-	-	-	4
	14	Kimia	2	2	-	-	-	-	4
	15	Bhs Inggris	3	3	-	-	-	-	6
		Sub Jml	37	37	19	17	13	11	134 60%
Pilihan	16	Matematika	-	-	6	6	8	6	26
	17	Biologi	-	-	2	2	3	3	10
	18	Fisika	-	-	4	6	6	6	22
	19	Kimia	-	-	4	4	5	5	18
	20	Bhs Inggris	-	-	3	3	3	3	12
		Sub Jml	-	-	19	21	25	23	88 40%
		Jumlah	37	37	38	38	38	34	222 100 %

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program pengajaran kurikulum SMA tahun 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

PMP masuk dalam “Program Inti” diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III, di SMA program A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya), maupun A5 (Ilmu Agama).

Lajunya pembangunan nasional, telah melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan juga di dalam pendidikan nasional. Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 144). Ketika Dr. Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan digariskanlah kebijakan pendidikan sistem pendidikan nasional yang mempunyai tiga ciri:

- (1) Semesta, artinya meliputi semua unsur kebudayaan yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan spiritual.
- (2) Menyeluruh, artinya pendidikan untuk seumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.
- (3) Terpadu, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga madrasah merupakan suatu

keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini menghendaki satu sistem dan pengelola tunggal terhadap sistem tersebut.

Sementara itu, telah lahir pula GBHN 1978 dan 1983. Tentunya ketetapan-ketetapan MPR tersebut memberikan masukan yang sangat berharga di dalam penyempurnaan kurikulum nasional. Perlu dicatat bahwa menteri Daoed Josoeff mempunyai suatu konsep pemikiran yang brilian mengenai pendidikan nasional. Baginya pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Oleh sebab itu, semua nilai kebudayaan perlu mendapatkan tempat yang layak di dalam kurikulum pendidikan. Dalam rangka inilah muncul konsep mengenai pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan moral dan estetika. Pendidikan bukan hanya akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Keinginan Menteri Daoed Josoeff untuk meningkatkan pendidikan nasional diikuti dengan pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang diketuai Prof Dr. Slamet Imam Santoso dan Wakil ketuanya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Hasil karya komisi tersebut yang selesai dengan laporannya pada tahun 1980, merupakan masukan sangat berarti di dalam usaha penyusunan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang baru untuk menggantikan UU no. 4 Tahun 1950 (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 145).

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dengan masukan yang sangat berarti dari hasil Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, begitu pula dengan TAP MPR No. IV/1983, maka lahirlah Kurikulum 1984 dengan ciri-ciri menonjol menjawab tiga pertanyaan pokok sebagai berikut: 1) Apa yang akan diajarkan? 2) Mengapa diajarkan? 3) Bagaimana diajarkan?

Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini lebih mengarahkan Kurikulum 1984 sebab di dalam kurikulum baru ini harus jelas dirumuskan mengapa sesuatu diajarkan dan bagaimana diajarkannya agar berhasil. Di dalam kaitan ini hasil-hasil eksperimen yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur yang terkenal dengan “Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSA), lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebut. Pada dasarnya kurikulum tersebut terbagi atas program inti dan program pilihan pada tingkat SMA. Juga dibedakan antara program A untuk jalur akademik dan program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekarayaan. Sayang sekali kurikulum yang sangat

baik dipersiapkan itu tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti program B yang tidak sempat dilaksanakan karena kekurangan tenaga pelatih, peralatan dan para instruktur.

Sebagaimana halnya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 146). Kurikulum 1984 mempunyai kelemahan-kelemahan umum sebagai berikut:

Terlalu sentralistik sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah-daerah. Sayang sekali kemampuan daerah untuk melengkapi kurikulum tersebut sangat terbatas, demikian pula para guru, para penilik dan pejabat-pejabat lainnya tidak dipersiapkan secara menyeluruh dan matang untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Demikian pula keterbatasan dana untuk melaksanakan kurikulum tersebut merupakan kendala-kendala klasik yang telah membatasi keberhasilannya antara lain mutu para guru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Para guru tingkat SMA misalnya mempunyai kualifikasi yang berbeda dengan apa yang diajarkannya. Dalam suatu penelitian yang diselenggarakan oleh Konsorsium Ilmu Pendidikan mengenai pemanfaatan guru sekolah menengah tahun 1990-1991 misalnya ditemukan bahwa sekitar 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajarkan mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Sebagai contoh, guru mata pelajaran agama, sosiologi, antropologi, dan bahasa Indonesia terpaksa mengajar matematika. Demikian pula kurikulum yang baru itu tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK.

Dalam pandangan T. Raka Joni (1984: 1-19), perbedaan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

Kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan, sedang Kurikulum 1994 merupakan Kurikulum 1984 yang disempurnakan. Jadi, antara Kurikulum 1984 dengan Kurikulum 1994 tidak terdapat perubahan yang mendasar, atau dengan kata lain yang ada hanyalah penyempurnaan. Salah satu perbedaan Kurikulum 1975 dengan Kurikulum 1984 adalah masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktif dalam proses memperoleh hasil belajar serta mengolah perolehan tersebut. Acuan keaktifan itu dicantumkan pada kolom tujuan instruksional dan uraian. Kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan kesertaan siswa (*student centered*) dalam memperoleh hasil belajar dan mengolah hasil tersebut dinamakan “keterampilan proses”. Kegiatan belajar mengajar ini dikembangkan melalui “Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSA, *Student Active Learning*).

Kurikulum 1984 mulai memperkenalkan sistem semester untuk tingkat SMP dan SMA, sementara di tingkat SD tetap menggunakan sistem Catur Wulan (Cawu). Mulai Kurikulum 1984 wajib diajarkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak di SD sampai SMA pada tiap tingkat/kelas, masing-masing selama satu semester (SMP dan SMA) dengan beban seluruhnya 6 kredit, atau selama 2 jam pelajaran perminggu per Catur Wulan pada tiap kelas dari kelas I sampai kelas VI Sekolah Dasar di samping telah diberikannya mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila) bagi siswa baru pada tingkat SMTP, SMTA, maupun Perguruan Tinggi (Depdikbud, 1985: 143-144).

Penerapan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) dikembangkan lebih luwes, dimana guru diberi kesempatan mengembangkan alternatif buku acuan mengajar, metode penyajian, serta memperluas sarana pendidikan yang ada seperti laboratorium dan perpustakaan. Sistem evaluasi ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk tes tulis atau tes lisan, melainkan juga tes perbuatan dan observasi, mengingat bahwa komponen tingkah laku merupakan salah satu bagian dari keterampilan proses. Mulai Repelita IV diberlakukan EBTANAS untuk pendidikan dasar dan menengah (Depdikbud, 1985: 142). Hasil dari sistem evaluasi berskala nasional ini yakni berupa Daftar Nilai EBTANAS Murni (DANEM) dipakai sebagai prasarat bagi keikutsertaan murid pada jenjang pendidikan selanjutnya. Setelah berlaku selama hampir dua dasawarsa, pada 2001, EBTANAS untuk tingkat SD ditiadakan, dan sebagai gantinya murid yang hendak melanjutkan ke jenjang SLTP mengikuti test masuk. Sementara untuk tingkat SLTP dan SMU masih diberlakukan EBTANAS.

Pengelompokan bidang studi hanya pada dua bagian: Program Inti (*core program*), dan program pilihan (*alternative program*). Program inti merupakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa, yang diarahkan pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan minimal. Di sini Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok inti (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 148).

d. Kurikulum PKN 1994

Profil PPKn dalam Kurikulum 1994 sebagai perluasan kajian P4 di sekolah tampak dari ruang lingkup materinya mulai dari SD hingga SMA yang mencakup nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam P4 (Samsuri, 2010: 127).

Menyadari akan kebutuhan pembangunan nasional, demikian pula dengan lahirnya Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dirasa perlu menyusun suatu kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1984. Usaha yang besar ini yaitu memiliki suatu kurikulum yang berdasarkan UU baru yang dilahirkan dalam Orde Baru merupakan suatu prestasi yang besar. Kurikulum baru tersebut untuk SD sampai sekolah menengah telah dapat dirampungkan dan diberlakukan mulai

tahun ajaran 1994/1995 secara bertahap. Dimulai pada tahun ajaran 1994/1995 Kurikulum 1994 diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Dengan demikian di dalam jangka waktu tiga tahun seluruh Kurikulum 1994 itu telah dilaksanakan.

Menurut Wardiman Djojonegoro (1996: 269), pengembangan kurikulum 1994 meliputi beberapa aspek fundamental, antara lain:

Pertama, Kurikulum 1994 menerapkan pelajaran muatan lokal, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Pengertian lokal tidak dibatasi oleh wilayah pemerintahan tertentu tetapi tergantung dari tujuan yang dipelajari atau yang ditunjukkan oleh ruang lingkup wilayah tempat suatu bahan kajian dapat diberlakukan. Muatan lokal meliputi: Pendidikan budaya lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat dan lainnya. Pendidikan Keterampilan, seperti elektronika, komputer, kerajinan kayu/ukir, tata boga, tata busana dan lainnya. Pendidikan Lingkungan, seperti wawasan lingkungan, pendidikan budi pekerti, dan permasalahan sosial.

Kedua, ditingkatkannya wajib belajar (wajib) yang semula pada 2 Mei 1984 mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk masuk ke Sekolah Dasar, menjadi wajib belajar sembilan tahun sejak 2 Mei 1994, yakni wajib menempuh pendidikan selama enam tahun di SD ditambah tiga tahun di SLTP. Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konseptual, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu kesatuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik, tetapi tetap berbentuk dua lembaga terpisah.

Ketiga, pada Kurikulum 1994 dilakukan beberapa perubahan nama dari SMP menjadi SLTP, dari SMA menjadi SMU. Perubahan juga dilakukan terhadap penamaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa (di SMA) menjadi jurusan A1 (Ilmu Fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 (Ilmu Sosial), A4 (Ilmu Budaya) dan A5 (Ilmu Agama) di SMU. Lalu kembali lagi menjadi jurusan IPA, IPS dan Bahasa seperti pada kurikulum sebelumnya. Juga terjadi perubahan masa sekolah di SLTP dan SMU yang sebelumnya, yakni Kurikulum 1984, mengikuti pola semester, menjadi sama dengan di SD yang mengikuti pola Catur Wulan, sehingga mulai SD sampai SMU seluruhnya mengikuti pola Catur Wulan. Perkembangan berikutnya, pada tahun ajaran 2002, seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMU ditetapkan kembali mengikuti pola Semester, sama seperti ketika diberlakukan Kurikulum 1984. Dengan demikian saat ini mulai pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, semuanya menganut satu pola yang seragam, yakni sistem semester. Salah satu dampak positif berlakunya sistem semester ini adalah terjadinya penyederhanaan pelaksanaan evaluasi belajar, yang semula tiga kali dalam setahun, menjadi dua kali. Selain itu, hari efektif belajar makin banyak. (Wardiman Djojonegoro, 1996: 269).

Mata pelajaran PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kurikulum ini mulai berlaku secara bertahap pada tahun pelajaran 1994/1995. Sebagai

pelaksanaan UU No. 2, Tahun 1989 dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, kurikulum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Landasan pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Kurikulum 1994, Depdikbud, 1993).

Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Penetapan ini tertuang dalam tiga lampiran, yaitu Lampiran I berisi tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar, Lampiran II berisi tentang Garis-Garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Dasar, dan Lampiran III berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar. Penyebutan SLTP dilaksanakan mulai tahun 1994 sejak berlakunya kurikulum 1994 sebagai pengganti SMP dan SLTP Kejuruan yang telah terintegrasi habis menjadi SMP (Kurikulum 1994, Depdikbud, 1993).

(1) Kurikulum SD 1994

Program pengajaran pada pendidikan dasar terdiri dari isi program pengajaran, lama pendidikan, dan susunan program pengajaran. Berdasarkan Pasal 39, Ayat (3) UU Nomor 2, tahun 1989 dan Pasal 14, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28, Tahun 1990, ditegaskan bahwa isi kurikulum memuat sekurang-kurangnya 13 bahan kajian yang meliputi: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; (3) Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Bahasa Indonesia; (5) Membaca dan Menulis; (6) Matematika (termasuk berhitung); (7) Pengantar Sains dan Teknologi; (8) Ilmu Bumi; (9) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; (10) Kerajinan Tangan dan Kesenian; (11) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (12) Menggambar; dan (13) Bahasa Inggris. Berdasarkan pasal tersebut, bahan kajian tersebut bukan merupakan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu bahan kajian dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu bahan kajian dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. Dalam penjelasan Kurikulum 1994 (Depdikbud, 1993), dinyatakan bahwa:

Mata pelajaran adalah satu atau sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema, dan nilai, yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin pengetahuan. Program Pengajaran pada pendidikan dasar mencakup

susunan mata pelajaran, penjatahan waktu, dan penyebarannya di setiap kelas dan satuan pendidikan. Susunan program pengajaran terdiri dari program kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan terhadap program kurikuler. Kegiatan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian seperti kepramukaan, usaha kesehatan sekolah, olahraga, palang merah, kesenian, dan kegiatan lainnya diselenggarakan juga dengan menggunakan waktu di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program. (Depdikbud, 1993).

Tabel 19
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Dasar

No	Mata pelajaran	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 4	Kel. 5	Kel. 6
1	PPKn	2	2	2	2	2	2
2	Pend. Agama		2	2	2	2	2
3	Bhs Indonesia	10	10	10	8	8	8
4	Matematika	10	10	10	8	8	8
5	IPA	-	-	3	6	6	6
6	IPS	-	-	3	5	5	5
7	Kerajinan	2	2	2	2	2	2
8	Pend. Jasmani	2	2	2	2	2	2
9	Bhs. Inggris	-	-	-	4	4	4
10	Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7
	Jumlah	30	30	38	40	42	42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993.

Dalam Kurikulum 1994, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SD PPKn, diberikan 2 jam permimngu dari kelas I sampai dengan kelas VI.

(2) Kurikulum SMP 1994

Tabel 20
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
SLTP

No	Mata pelajaran	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3
1	PPKn	2	2	2
2	Pend. Agama	2	2	2
3	Bhs Indonesia	6	6	6
4	Matematika	6	6	6
5	IPA	6	6	6
6	IPS	6	6	6
7	Kerajinan	2	2	2
8	Pend. Jasmani	2	2	2
9	Bhs. Inggris	4	4	4

10	Muatan Lokal	6	6	6
	Jumlah	42	42	42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993.

Sama halnya di SD, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di SMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SMP PPKn, diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

(3) Kurikulum SMU 1994

Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) 1994 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/93, tanggal 25 Februari 1993 tentang kurikulum SMU. Penetapan ini tercantum dalam tiga lampiran, yaitu Lampiran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum SMU, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran SMU dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMU. Penyebutan SMU dilaksanakan mulai tahun 1994 sejak berlakunya kurikulum 1994 sebagai pengganti SMA.

Tujuan pendidikan SMU adalah menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Kurikulum SMU merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMU. Program pengajaran SMU terdiri dari program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran umum diselenggarakan di kelas I dan II, sedangkan program pengajaran khusus mulai diadakan di kelas III.

Program pengajaran umum yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas I dan kelas II ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih program pengajaran khusus yang sesuai di kelas III. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam 10 mata pelajaran, yaitu: (1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) Pendidikan agama; (3) Bahasa dan Sastra Indonesia; (4) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; (5) Bahasa Inggris; (6) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; (7) Matematika; (8) Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Biologi, Kimia; (9) Ilmu Pengetahuan Sosial, Ekonomi, Sosiologi, Geografi; dan (10) Pendidikan Seni.

Jika program umum diselenggarakan di kelas I dan II, maka Program Pengajaran Khusus diselenggarakan di kelas III dan dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada

jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademis maupun profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Program pengajaran khusus terdiri dari tiga jenis yaitu Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alam, dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial.

Tabel 21
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Menengah Umum

No	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III Bahasa	Kelas III IPA	Kelas III IPS
A	Umum					
1	PPKn	2	2	2	2	2
2	Pend. Agama	2	2	2	2	2
3	Bhs & Sast. Indo	5	5	3	3	3
4	Sej Nas & Umum	2	2	2	2	2
5	Bhs. Inggris	4	4	5	5	5
6	Pend. Jasmani	2	2	(2)	(2)	(2)
7	Matematika	6	6	-	-	-
8	IPA					
	a. Fisika	5	5	-	-	-
	b. Biologi	4	4	-	-	-
	c. Kimia	3	3	-	-	-
9	IPS					
	a. Ekonomi	3	3	-	-	-
	b. Sosiologi	-	2	-	-	-
	c. Geografi	2	2	-	-	-
10	Pend. Seni	2	-	-	-	-
	Sub Jumlah	42	42	14 (16)	14 (16)	14 (16)
B	Khusus					
	Program Bahasa					
1	Bhs & Sast. Indo.	-	-	8	-	-
2	BHs. Inggris	-	-	6	-	-
3	Bhs. Asing	-	-	9	-	-
4	Sejarah Budaya	-	-	5	-	-
	Program IPA					
1	Fisika	-	-	-	7	-
2	Biologi	-	-	-	7	-
3	Kimia	-	-	-	6	-
4	Matematila	-	-	-	8	-
	Program IPS					
1	Ekonomi	-	-	-	-	10
2	Sosiologi	-	-	-	-	6
3	Tata Negara	-	-	-	-	6
4	Antropologi	-	-	-	-	6
	Sub Jumlah			28	28	28
	Jumlah	42	42	42	42	42

Sumber: Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Depdikbud, 1993.

Seperti halnya di SD, dan SMP mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di SMU berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di SMU PPKn, diberikan 2 jam perminggu dari kelas I sampai dengan kelas III.

C. Profil Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era

Reformasi

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Sejak Orde Baru menghasilkan kebijakan Kurikulum 1975 hingga 4 tahun setelah Reformasi atau sekitar 27 tahun, kurikulum pendidikan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti. (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 163). Setelah hampir satu dekade, Kurikulum 1994 menuai banyak penilaian dari masyarakat sebagai kurikulum yang terlalu sarat materi, tumpang tindih (*overlapping*), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik. Sementara siswa lebih cenderung untuk diajar (sebagai obyek) bukan belajar (sebagai subyek). Maka dengan maksud untuk menyesuaikan perubahan zaman, baik akibat desakan internal maupun eksternal, kurikulum 1994 dikembangkan ke arah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, *Competency Based Curriculum*).

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 165), perbedaan pokok antara kurikulum konvensional (Kurikulum 1994 dan sebelumnya) dengan KBK nampak dalam beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kurikulum konvensional menekankan pada isi (*content based*) sebagaimana terlihat dalam penguasaan materi pelajaran dan pencapaian target kurikulum yang harus diselesaikan baik oleh guru maupun murid, sedang KBK mengutamakan kemampuan (*competency based*).

Kedua, karena kurikulum konvensional berbasis pada isi (*content based*), maka proses pembelajarannya berorientasi pada buku teks (*textbook oriented*) dimana dalam prakteknya sangat tergantung pada guru (*teacher centered*), sedang pada KBK bahan ajar yang dipilih menggunakan bantuan multimedia. Dari sini KBK diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sekaligus menyenangkan karena berupaya memadukan antara pendidikan (*education*) dengan hiburan (*entertainment*). Peran guru dalam KBK adalah sebagai fasilitator/nara sumber, guru memberi bimbingan seperlunya pada siswa yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran (*active learning*).

Ketiga, evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkan pada kecepatan kelompok, sementara KBK melihat kecepatan individual. Itu sebabnya, kemajuan siswa dalam KBK berprinsip pada penghargaan atas kemajemukan siswa dalam satu kelas, bukan upaya penyeragaman perlakuan.

Keempat, feed back atau umpan balik dalam kurikulum konvensional dilakukan tidak secara langsung setelah satu unit pembelajaran selesai dilaksanakan, melainkan ditunda dalam tahapan waktu tertentu, seperti dalam satu catur wulan, semester atau tingkat. Berbeda dengan itu, KBK menerapkan umpan balik seketika setelah satu unit pembelajaran selesai dilakukan.

Kelima, kurikulum konvensional berbasis waktu, sedangkan KBK menerapkan kurikulum berbasis kinerja.

Keenam, kurikulum konvensional berorientasi pada mata pelajaran, sementara KBK pada moduler yang menekankan pada belajar tuntas (*mastery learning*) dan belajar berkelanjutan (*continous learning*), dimana sebelum satu modul mampu dikuasai, seorang siswa belum bisa pindah ke modul berikutnya.

Ketujuh, kurikulum konvensional menjabarkan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus dalam TIU/TPU dan TIK/TPK, yang dalam praktiknya seringkali dilaksanakan secara subyektif dan mengabaikan pentingnya proses dan produk pembelajaran. Tidak seperti itu, KBK menjabarkan kompetensi dasarnya melalui hasil belajar beserta indikatornya (*learning outcomes*) yang dibuat secara obyektif melalui acuan kriteria penilaian yang jelas.

Betapapun di atas kertas, konsep KBK dipandang memberi alternatif atas kelemahan kurikulum konvensional, dalam realisasinya belum tentu menampakkan hasil yang sama antara satu lembaga dengan lainnya. Menurut Muchson:

Kurikulum merupakan salah satu faktor dari berbagai faktor pendidikan yang mempengaruhi keseluruhan proses pendidikan. Munculnya KBK sejalan dengan upaya reformasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR No. II/GBHN/1999 yang isinya merekomendasikan bahwa kurikulum sekarang perlu dikembangkan, secara desentralistik. Lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana keduanya efektif berlaku sejak 2001, telah berimbas pada otonomi pendidikan. KBK, *School and Community Based Manajement*, penilaian berbasis kelas dan lain sebagainya adalah bukti dari otonomi pendidikan (wawancara, 15 Desember, 2010).

Kurikulum yang dirancang berdasarkan kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum ini ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional (Pusat Kurikulum, 2002: 2). Dalam pandangan Udin S. Winataputra:

Guru tetap menjadi kunci keberhasilan pengimplementasian sebuah kurikulum. Sebagai salah satu *stakeholder*, guru tetap menjadi sorotan. Hal-hal yang menjadi perhatian para

pengamat bidang pendidikan yang berhubungan dengan guru ini adalah (a) *mindset* guru sulit berubah; (b) kemampuan guru selalu menjadi pertanyaan; (c) komitmen guru terhadap tugas akademiknya acap kali dipermasalahkan; (d) kreativitas guru kurang mendapatkan pembinaan; (e) kesejahteraan guru kurang diperhatikan (wawancara, 6 Agustus, 2011).

Senada dengan Muchson dan Udin S. Winataputra, menurut Cholisin perubahan sikap para guru tidak berbanding lurus dengan perubahan kurikulum. Lebih lanjut beliau menyatakan:

Sering kita mendengar para pakar dan pengamat mengatakan bahwa guru kita mengalami *stagnasi*. Mereka cenderung mengalami kemadegan dalam merespon perkembangan, sehingga malas memperbarui dirinya sendiri. Dalam mengelola kelas, guru juga cenderung melakukan mismanajemen. Guru terbiasa menganggap bahwa proses belajar itu hanyalah upaya guru memasuki ranah kognisi siswanya. Kurikulum dapat saja berubah dalam waktu tertentu, namun tetap saja dalam pelaksanaannya tidak berubah dari waktu ke waktu (wawancara, 1 Desember 2010).

Kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sering kali dinilai kurang profesional. Selalu menjadi pertanyaan banyak orang, apakah dalam menghadapi perubahan kurikulum ini para guru kita memiliki kemampuan menjalankan kurikulum baru ini?. Para guru di lapangan terkesan belum maksimal dalam mengembangkan kemampuannya. Para guru harus diberi kesempatan membaca, menulis, menuntut ilmu yang lebih tinggi, serta menghadiri rapat-rapat MGMP, kelompok kerja guru, seminar, lokakarya, dan sebagainya.

Tantangan bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi ini adalah masalah implementasi. Perencanaan yang baik belum tentu akan menghasilkan produk yang baik. Hal tersebut tergantung pada implementasinya, di mana harus didukung dari semua pihak. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan nasional, khususnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi harus ada *political will* dan *good will* dari semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan ini.

Menurut Samsuri (2010: 138), fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 adalah:

”Untuk membentuk warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter baik, serta setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945” .

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Samsuri, 2010: 138), adalah, untuk membentuk kemampuan:

- (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
 (2) Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Pembentukan diri yang didasarkan pada karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006, standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dari tingkat SD hingga SMA ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 22
 Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

SD	SMP	SMA
<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan • Memahami dan menerpakan hidup rukun di rumah dan di sekolah • Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah • Memahami hidup tertib dan gotong royong • Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis • Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja, dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila • Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun pusat • Memahami makna keutuhan NKRI, dengan kepatuhan terhadap UU, peraturan, kebiasaan adat istiadat, dan menghargai keputusan bersama • Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa • Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia • Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggungjawab • Menampilkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 • Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat • Menjelaskan makna otonomi daerah, dan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah • Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi • Memahami prestasi diri untuk berprestasi sesuai dengan keindividuannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi • Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan, serta penegakkan HAM • Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem hukum internasional • Mnegevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 • Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerjasama global lainnya. • Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 (dalam Samsuri 2010: 187).

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Sejak 2006 pemerintah menerapkan kurikulum yang mekanismenya ditekankan pada peran satuan pendidikan, yakni dengan KTSP. KTSP pada dasarnya adalah KBK yang diotonomikan kepada masing-masing tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah KBK yang didelegasikan pada sekolah. Secara substansi KTSP sama dengan KBK.

KTSP terkait dengan otonomi manajemen sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS). KTSP sebagai konsekuensi pelaksanaan MBS. Kurikulum menjadi otonomi sekolah, artinya sekolah harus aktif mengembangkan kurikulum bukan menunggu kurikulum pusat. MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud dari reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. Dalam MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah.

Lahirnya KBK dan KTSP sebenarnya didasarkan pada: (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; (4) Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan; (5) Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006. Dasar hukum di atas yang menjadi landasan bagi sekolah untuk menerapkan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

c. KTSP 2006 Pendidikan Kewarganegaraan SD, SMP, dan SMA

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Pengantar KBK PKn, (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 2) menyatakan bahwa:

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang

warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Lebih lanjut dalam Pengantar KBK PKn, (Departemen Pendidikan Nasional, 2004: 3) dijelaskan bahwa:

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelompokkan ke dalam aspek dan sub aspek bahan pelajaran yaitu:

Tabel 23
Ruang Lingkup Isi Pendidikan Kewarganegaraan

No	Dimensi Keilmuan	Materi
1.	Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai <i>zoon politicon</i> (makhluk sosial) 2. Proses terbentuknya masyarakat politik 3. Proses terbentuknya bangsa 4. Asal usul negara 5. Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara 6. Kewarganegaraan 7. Lembaga politik 8. Model-model sistem politik 9. Lembaga-lembaga negara 10. Demokrasi Pancasila 11. Globalisasi
2.	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rule of law</i> (negara hukum) 2. Konstitusi 3. Sistem hukum 4. Sumber hukum 5. Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum 6. Pembidangan hukum 7. Proses hukum 8. Peradilan

3.	Moral	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian nilai, norma, dan moral2. Hubungan antara nilai, norma, dan moral3. Sumber-sumber ajaran moral4. Norma-norma dalam masyarakat5. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila
----	-------	--

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional. (2004). KBK PKn.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde Lama adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. (b) Materi pelajaran didominasi oleh Manipol USDEK sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas. (c) Dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa, serta pendukung setia status quo. (d) Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi.
2. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde Baru adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila serta manusia Indonesia seutuhnya. (b) Materi pelajaran meliputi: P4 (sangat dominan), UUD 1945, GBHN, dan Sejarah Kebangsaan. PKn Orde Baru dirancang untuk mendukung penguatan negara, stabilitas nasional, patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa, serta pendukung setia status quo, dalam rangka mensukseskan pembangunan. (c) Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegemoni. P4 bukan saja mendominasi PKn persekolahan, akan tetapi juga menjangkau pendidikan luar sekolah. Penataran P-4 tidak hanya dilakukan kepada seluruh siswa dan mahasiswa, akan tetapi juga dilakukan kepada PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh masyarakat.
3. Profil PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi adalah sebagai berikut: (a) Bertujuan memberdayakan warga negara, yakni membentuk warganegara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (b) Materi pelajaran meliputi politik (cukup dominan), hukum (cukup dominan), dan moral Pancasila (sangat minim). PKn pada era ini akar keilmuannya mulai jelas, intervensi pemerintah yang sedang berkuasa minim, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral. (c) Metode pembelajarannya menggunakan dialog kritis.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, tentang profil PKn yang terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, peneliti merekomendasikan, pengembangan PKn di masa depan yang ideal bagi Indonesia adalah sebagai berikut: (1) PKn yang memiliki akar keilmuan

yang jelas, yakni politik, hukum, dan moral, sehingga bersifat ilmiah. (2) PKn yang berpedoman pada politik negara sesuai konstitusi, serta bebas dari hegemoni, indoktrinasi, dan kepentingan pragmatis dari rezim yang sedang berkuasa. (3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai universal yang digunakan oleh negara-negara demokrasi, namun tetap berada dalam bingkai filosofi Pancasila, diwarnai identitas nasional yang Bhineka Tunggal Ika. (4) PKn yang mengembangkan *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition* secara proporsional. (5) PKn yang menghasilkan warga negara religius, yang menjadi pembeda dengan yang dikembangkan oleh negara-negara maju di Barat. (6) PKn yang memberdayakan warga negara, bukan PKn yang hanya membentuk kepatuhan tanpa daya kritis, serta mampu mengantarkan menuju masyarakat madani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, dan Artikel Jurnal

- Abdul Azis Wahab. (2000). *New paradigm and curriculum design for new Indonesian civic education*. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March 29, 2000, at Bandung.
- _____ (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Ilmu dan aplikasi pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Ace Suryadi dan Somantri. (2000). *Pemikiran kearah rekayasa kurikulum pendidikan kewarganegaraan*. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education March 29, 2000, at Bandung.
- Branson, M.S. (1998). *The role of civic education*. A forthcoming education policy task force position paper from the communitarian network.
- Center for Indonesian Civic Education. (2000). *A needs assesment for new Indonesian civic education : A national survey 1999-2000*. Bandung : Conducted by CICED in Collaboration with United States Information Agency/Service USIA/USIS.
- Cholisin. (2000). *Ilmu kewarganegaraan*. Universitas Terbuka
- _____ (2003). *PPKn paradigma baru dan pengembangannya dalam KBK*. Makalah disampaikan pada Training of Trainer (ToT) Guru SLTP Mata Pelajaran PPKn, di Surakarta.
- Cogan, John J and Derricott, Ray. (1998). *Citizenship for the 21 st century: An international perspective and education*. London: Cogan Page.
- Dagger, R. (2002). "Republican citizenship". dalam Bryan S. Turner dan Engin F. Isin (eds). *Handbook of citizenship studies*. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications.
- Daroeso, Bambang. (1988). *Dasar dan konsep pendidikan moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dasim Budimansyah dan Suryadi, K. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat multikultural*. Bandung: Prodi PKN SPS UPI Press.
- Djojonegoro, Wardiman, dkk. (1995). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Emran, Ali. (1981). *Beberapa isu dalam PMP (makalah Penlok nasional pengembangan kurikulum bidang studi PMP)*. Bandung 12 Jnuari s/d 8 Februari 1981.
- Erry Utomo, dkk. (1997). *Pokok-pokok pengertian dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal*. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud.
- Kalidjernih, F.K. (2007). *Cakrawala baru kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Regina.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2005). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Kosasih Djahiri, dkk. (1997). *Panduan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahendra, Yusril Ihza. (1996). *Dinamika tatanegara Indonesia: Kompilasi aktual masalah konstitusi dewan perwakilan dan sistem kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Marshal, TH. and Bottomore, T. (1992). *Citizenship and social class*. London and Concoer: Pluto Press.
- Muchson Abdurrahman. (2004). *Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dan implementasinya dalam kurikulum berbasis kompetensi*. Jurnal

Civic: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 1 Nomor 1. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS UNY.

-
- (2009). *Dimensi moral dalam pendidikan kewarganegaraan*
Yogyakarta: Jurnal Civics Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY, Volume 6 Nomor 1 Juni 2009.
- Redaksi Sketsa Masa. (1961). *Tujuh bahan pokok indoktrinasi*. Surabaya: Penerbit Grip.
- Samsuri. (2010). *Transformasi gagasan masyarakat kewarganegaraan melalui Reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Studi pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era reformasi)*. Disertasi. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana.
- Udin S. Winataputra. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Landasan, konteks, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.

Risalah Resmi dan Sumber-Sumber Lain

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1985). *Mengemban masa depan: Kumpulan sambutan Prof. Dr.Nugroho Notosusanto, buku kedua*. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Kurikulum 2004: pedoman penilaian kelas. *Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1962). *Kurikulum SMA 1962*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Kurikulum pendidikan sekolah dasar 1968a*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Rencana pendidikan SMP 1968b*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). *Rencana pendidikan SMA 1968c*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1969). *Pedoman kerja sekolah pendidikan guru*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975a: Buku I ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975b: Buku II B bidang studi pendidikan moral Pancasila*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Kurikulum sekolah menengah atas 1975c: Buku III pedoman evaluasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). *Konsep dan strategi pendidikan moral Pancasila di sekolah menengah*. Jakarta: P2LPTK.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-ketentuan pokok*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Penjelasan ringkas tentang buku pendidikan moral Pancasila*. Jakarta: Dirjen Dasmen.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). *Perkembangan pendidikan dasar dan menengah tahun 1945-1999*. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Kurikulum 1994 pendidikan dasar dan pendidikan menengah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *GBPP PPKn suplemen 1999*. Jakarta: Depdikbud.

- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas. (2004). *Pedoman khusus pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Direktorat Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas.(2004). *Pedoman khusus pengembangan silabus dan penilaian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2002). *Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdikbud.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003a). *Standar kompetensi bahan kajian*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003b). *Standar kompetensi mata pelajaran pengetahuan sosial SD dan MI*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003d). *Standar kompetensi mata pelajaran kewarganegaraan SMA dan MA*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003e). *Kurikulum 2004: Naskah akademik*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Risalah Rapat Paripurna ke-7 Sidang Tahunan MPR 11 Agustus 2002 Buku Keempat* (diunduh dari www.mpr.go.id).
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.